YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PEKANBARU

EVALUASI KEBIJAKAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEKANBARU DALAM MENERTIBKAN PARKIR ILEGAL DI KOTA PEKANBARU

SKRIPSI

DiajukanUntukMemenuhi Salah SatuSyarat-Syarat PenyusunanSkripsi PadaFakultasIlmuSosial Dan IlmuPolitik
Universitas Islam Riau

Oleh:

SOFIA AYUNI
NPM : 177310161

JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU TAHUN
2021

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama	:	Sofia Ayuni
NPM	:	177310161
Program Studi	:	Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan	:	Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi	:	Evaluasi Kebijakan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dalam Menertibkan Parkir Ilegal Di Kota Pekanbaru

Format sistematika dan pembahasan masing-masing materi dalam naskah skripsi ini telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diseminarkan

Pekanbaru, 5 April 2021

Ketua,	Kaprodi IlmuPemerintahan
Prof. Dr.H Yusri Munaf, SH. M.Hum	Dr. Ranggi Ade Febrian S.IP., M.Si

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadiran ALLAH SWT, diiringi shalawat dalan salam kepada nabi muhammad SAW, karena atas rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan Usulan penelitian ini dengan judul "Evaluasi Kebijakan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dalam Menertibkan Parkir Ilegal Kota Pekanbaru" dalam penyelesaian usula penelitian penulis banyak pelajaran dan mendapatkan bantuan baik berupa waktu, tenaga, kritikan dan diajukan ke fakultas dalam rangka memenuhi salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S1) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

Penulis menyadari pula bahwa dalam proses studi maupun dalam proses penulisan dan penyelesaian skripsi ini banyak pihak turut membantu. Sehubungan dengan itu secara khusus pada lembaran ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., M.CL selaku Rektorat Universitas Islam Riau yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimbah ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin.
2. Bapak Indra Safri, S.Sos., M.si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau
3. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.si selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

4. Bapak Prof. Dr. H. Yusri Munaf, SH., M.Hum yang telah berkenan untuk membimbing dan memberikan arahan kepada penulis dalam penyusunan usulan penelitian ini.
5. Bapak/Ibu Dosen, khususnya pada Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Islam Riau Kota Pekanbaru pada umumnya, yang telah membimbing penulis selama perkuliahan.
6. Seluruh Staff/Pegawai pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Kota Pekanbaru, yang telah memberikan kemudahan kepada penulis dalam mengurus berbagai keperluan administrasi yang berkaitan dengan perkuliahan.
7. Persembahan ini terutama kepada kedua orang tua penulis yang telah bekerja keras, berdoa, dan memberikan dorongan dan kasih saying yang tidak ternilai harganya.
8. Teman-teman penulis semuanya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Hanya Allah SWT yang akan membalas kebaikan teman-teman semua.

Penulis bermohon kepada Yang Maha Kuasa semoga jasa baik Beliau itu dibalas dengan rahmat dan karunia yang setimpal, amin.Akhirnya penulis berharap semoga usulan penelitian ini dapat memberikan manfaat yang cukup berarti kepada setiap pembacanya.

Pekanbaru,1 April 2021

Sofia Ayuni

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR ISI

Hal

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING i
KATAPENGANTAR ii
DAFTAR ISI iv
DAFTAR TABEL vii
SURAT PERNYATAAN viii
ABSTRAK ix
ABSTRACT x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 11

BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan 12
1. Konsep Pemerintahan 12
2. Konsep Evaluasi 16
3. Konsep Kebijakan 21
4. Konsep Parkir 24
5. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum 26

B. Penelitian Terdahulu 27
C. Kerangka Pikiran 29
D. Konsep Operasional 29
E. Operasional Variable 30
F. Teknik Pengukuran 32

BAB III METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian 35

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

B. Lokasi Penelitian..... 35
C. Populasi dan Sampel..... 35
D. Teknik Penarikan Sampel..... 36
E. Jenis dan Sumber Data..... 36
F. Teknik Pengumpulan Data..... 37
G. Teknik Analisis Data..... 38
H. Jadwal Kegiatan Penelitian..... 39

BAB IV GAMBARAN UMUM KOTA PEKANBARU

A. Sejarah Singkat Kota Pekanbaru…….....40
B. Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.....42
C. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum…….....45

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden…….....49
B. Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Evaluasi Kebijakan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dalam Menertibkan Parkir Ilegal Dikota Pekanbaru…….....52
1. Efektivitas…….....52
2. Efisiensi…….....55
3. Kecukupan…….....58
4. Perataan…….....62
5. Responsivitas…….....65
6. Ketepatan…….....68
C. Jawaban Responden.....71
D. Hambatan Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah KotaPekanbaru Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Evaluasi Kebijakan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dalam Menertibkan Parkir Ilegal Dikota Pekanbaru…….....74

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan…….....76

B. Saran…….....77

DAFTAR PUSTAKA…….**.....**78

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR TABEL

Tabel **Halaman**

II.1 Operasional Variabel Evaluasi Kebijakan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dalam Menertibkan Parkir Ilegal Di Kota Pekanbaru.....30

III.1. Populasi dan Sampel 36

III.2 Jadwal waktu Penelitian 39

IV.1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Pekanbaru 41

V.1 Klasifikasi Responden Penelitian di Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Berdasarkan Jenis Kelamin 50

V.2 Klasifikasi Responden Penelitian Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Berdasarkan Umur 50

V.3 Klasifikasi Responden Penelitian di Dinas Perhubungan Kota PekanbaruBerdasarkan Tingkat Pendidikan.....51

V.4 Penilaian Jawaban Responden Mengenai Indikator Efektivitas 53

V.5 Penilaian Jawaban Responden Mengenai Indikator Efisiesi 56

V.6 Penilaian Jawaban Responden Mengenai Indikator Kecukupan 60

V.7 Penilaian Jawaban Responden Mengenai Indikator Perataan 63

V.8 Penelitian Jawaban Responden Mengenai Indikator Responsivitas 65

V.9 Penilaian Jawaban Responden Mengenai Indikator Ketepatan 68

V.10 Jawaban Responden ……..…….....71

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

SURAT PERNYATAAN

Saya Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Peserta Ujian Komprehensif Yang Bertanda Tangan Di Bawah ini :

Nama	: Sofia Ayuni
Npm	: 177310161
Program Studi	: Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi	: Evaluasi Kebijakan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dalam Menertibkan Parkir Ilegal Di Kota Pekanbaru

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian Komprehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya ini saya menyatakan :

1. Bahwa naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dengan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa keseluruhan persyaratan administrasi, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya telah melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan diatas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian Komprehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 1 April 2021

SOFIA AYUNI

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

ABSTRAK

Kata kunci : Evaluasi Kebijakan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

Evaluasi kebijakan Dinas Perhubungan terhadap Peraturan Daerah tentang parkir ilegal dikota pekanbaru. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan hasil evaluasi terhadap Dinas Perhubungan kotapekanbaru dalam menertibkan parkir ilegal dikota pekanbaru, dinas yang mengatur urusan perhubungan adalah dinas perhubungan sedangkan bidang yang khusus untuk mengatur perparkiran pada dinas ini adalah UPTD parkir. Tetapi sesuai penelitian yang dilakukan oleh penulis, juru parkir ilegal yang ditangkap hanya dibawa ke kantor Dishubkominfo kota pekanbaru untuk kemudian di data dan diberikan peringatan. Juru parkir ini hanya disuruh membuat pernyataan tertulis untuk tidak berbuat seperti itu lagi dan setelah itu disuruh pulang. Jadi sanksi yang ditetapkan untuk juru parkir ilegal kurang tegas dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan tugas-tugas dinas perhubungan kota pekanbaru dalam penertiban parkir ilegal dikota pekanbaru dan hambatan-hambatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini metode kuantitatif; sampel sampel sebanyak 52 yang terdiri dari kepala Dinas Perhubungan kota pekanbaru, staf uptd parkir, juru parkir dan masyarakat. Teknik pengumpualn data kuisioner. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hasil rekapitulasi tanggapan responden dalam pengelolan perparkiran oleh dinas perhubungan menyatakan cukup baik. Hal ini karena tugas dinas perhubungan kota pekanbaru belum berjalan secara optimal, ini dapat dibuktikan masih adanya lokasi parkir ilegal dikota pekanbaru. sebetulnya Dinas Perhubungan kota pekanbaru telah menempuh upaya sosialisasi kepada petugas parkir tentang tata cara pengambilan retribusi yang baik dan benar, serta sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya membayar retribusi parkir bagi kepentingan pembangunan daerah. Namun upaya tersebut tampaknya tidak banyak memberikan dampak yang berarti. Sehingga target sektor ini dalam meningkatkan PAD kota pekanbaru cenderung mengalami penurunan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

POLICY EVALUATION OF THE DEPARTMENT OF TRANSPORTATION OF PEKANBARU CITY IN CONTROLLING ILLEGAL PARKING IN PEKANBARU CITY

By

Sofia Ayuni

NIM. 177310161

ABSTRACT

Keywords: Policy Evaluation of Pekanbaru City Transportation Service

Evaluation of the Department of Transportation's policies on Regional Regulations regarding illegal parking in the city of Pekanbaru. This study aims to explain the results of the evaluation of the Pekanbaru City Department of Transportation in curbing illegal parking in the city of Pekanbaru, the service that regulates transportation affairs is the transportation agency, while the special area for regulating parking at this service is UPTD parking. But according to the research conducted by the author, the arrested illegal parking attendants were only taken to the Pekanbaru City Dishubkominfo office for later data and warning. The parking attendant was only told to make a written statement not to do that again and after that he was told to go home. So the sanctions set for illegal parking attendants are less strict and not in accordance with Regional Regulations. The purpose of this study is to determine and explain the tasks of the Pekanbaru city transportation service in controlling illegal parking in the city of Pekanbaru and obstacles. The method used in this research is quantitative method; The sample is 52 samples consisting of the head of the Pekanbaru City Transportation Agency, parking staff, parking attendants and the community. Questionnaire data collection technique. Thisstudy concludes the results of trecapitulation of respondents' responses in parking management by the transportation agency are quite good. This is because the task of the Pekanbaru City Transportation Service has not been running optimally, it can be proven that there are still illegal parking locations in the city of Pekanbaru. In fact, the Pekanbaru City Transportation Agency has undertaken socialization efforts to parking officers about the proper and correct procedures for taking retribution, as well as socializing to the public about the importance of paying parking fees for the benefit of regional development. However, these efforts do not seem to have made much of a difference. So that the target of this sector in increasing PAD Pekanbaru city tends todecrease.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai tujuan yang sangat mulia yakni yang sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yakni untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia dan juga untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta untuk melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemardekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka dari itu untuk mencapai tujuan tersebut dibentuklah pemerintahan serta dibagilah indonesia itu atas daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang sebagaimana disebutkan dalam pasal 18 ayat (1)

Maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang Serangkaian UU Nomor 23 Tahun 2014 beserta perubahan-perubahannyamenyebutkan adanya perubahan susunan dan kewenangan pemerintahan daerah. Susunan pemerintahan daerah menurut UU ini meliputi pemerintahan daerah provinsi, pemerintahan daerah kebupaten, dan DPRD. Pemerintahan daerah terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh perangkat daerah. Pemerintahan daerah provinsi terdiri atas pemerintah daerah provinsi dan DPRD provinsi. Adapun pemerintah daerah kabupaten/kota terdiri atas pemerintah daerah kabupaten/kota dan DPRD kabupaten/kota.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 3 berbunyi Negara Indonesia adalah Negara hukum.Negara hukum adalah Negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Jadi segala tingkah laku manusia dalam menjalankan kebebasan dibatasi kaidah – kaidah / norma hukum agar pelaksanaan terhadap kebebasan tersebut tidak melanggar hak-hak orang lain yang menganggu ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat, hal ini sesuai dengan tujuan peraturan perundang – undangan. Sebagaimana diketahui Indonesia merupakan sebuah Negara kepulauan yang memiliki wilayah yang sangat luas, sehingga dalam hal ini tidak mungkin dalam menyelenggaraan keadilan bagi seluruh rakyat sampai kedaerah – daerah terpencil.

Kota Pekanbaru yang merupakan Ibu Kota Provinsi Riau, yaitu merupakan salah satu kota besar yang mengalami perubahan dan pembangunan yang begitu pesat di pulau Sumatra, salah satunya di bidang transportasi darat terkhusus kendaraan bermotor.

Mulai berkembangnyakota pekanbaru menuju kota Metropolis di mulai dengan di tetapkan visi kota Pekanbaru 2021 oleh pemerintah kota pekanbaru yang berbunyi: Terwujudnya Kota Pekanbaru sebagai pusat perdagangan dan jasa, pendidikan serta pusat kebudayaan melayu, menuju masyarakat yang berlandaskan iman dan taqwa.

Dalam mewujudkan visi Kota Pekanbaru 2021 pemerintah kota pekanbaru menyusun misi sebagai berikut:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

1. Mewujudkan penyelenggaraan tata kepemerintahan yang lebih baik.
2. Meningkatkan perekonomian rakyat dengan dukungan fasilitas yang memadai serta penanganan penyandangan masalah kesejahteraan sosial.
3. Meningkatkan transportasi yang memadai dan kualitas lingkungan serta penataan ruang terintegrasi
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelayanan pendidikan umum dan terjangkau pengembangan kehidupan beragama dan budaya melayu.
5. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang terjangkau bagi masyarakat.

Untuk mewujudkan visi kota pekanbaru , kota pekanbaru terus berbenah dan terus mengalami perkembangan penduduk, sektor ekonomi,sosial,transportasi dan perkembangan jumlah kendaraan bermotor

Dengan pertambahan penduduk kota pekanbaru berdampak pada pertumbuhan kendaraan bermotor yang merupakan kebutuhan masyarakat dalam menunjang aktifitas dan kebutuhannya. Tetapi semakin banyak jumlah kendaraan bermotor semakin banyak pula jumlah pemakai kendaraan bermotor ini yang tidak peduli terhadap aturan yang berlaku. seperti masyarakat yang tidak peduli fasilitas-fasilitas yang telah di sediakan oleh pemerintah kota pekanbaru. banyak masyarakat yang memarkirkan kendaraan sembarangan di jalan umum kota pekanbaru dalam hal ini akan menimbulkan ataupun memancing pungutan-pungutan ilegal oleh petugas parkir ilegal. Maka dari itu untuk mewujudkan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

ketertiban dan keteraturan maka perlu adanya pengelolaan yang baik oleh pemerintah kota pekanbaru terhadap perpakiran kedepannyaa.

Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara karena ditinggalkan oleh pengemudinya.kendaraan bermotor diluar badan jalan baik yang di sediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor yang kendaraan bermotor yang memungut bayaran. Pada dasarnya sistem transportasi terbagi atas 3 elemen utama yaitu kendaraan, prasarana lintasan, dan terminal. Lalu lintas berjalan menuju suatu tempat tujuan dan setelah mencapai tujuan kemudian di sebuah sebagai ruang parkir. Penyediaan fasilitas parkir juga dapat berfungsi sebagai salah satu alat pengendali lalu lintas.

Kota pekanbaru mempunyai instansi untuk memungut retribusi parkir yang mana instansi pemerintah tersebut adalah dinas perhubungan yaitu bagian UPTD parkir, dimana objek yang di awasi oleh UPTD parkir tersebut meliputi sarana dan prasarana parkiran, kordinator parkir, juru parkir, dan lokasi parkiran.

Untuk memenuhi kebutuhan fasilitas parkiran maka pada kawasan-kawasan tertentu dapat disediakan fasilitas parkir untuk umum yang di usahakan sebagai sesuatu kegiatan usaha yang berdiri sendiri dengan memungut bayaran. fasilitas tersebut dapat berupa gedung parkir ini pada dasarnya dapat di diklasifikasikan menjadi dua macam yaitu : parkir dijalan dan parkir di luar jalan.

Pesatnya kemajuan kotapekanbaru tidak di iringi dengan kesiapan infrastruktur parkir di tempat-tempat keramaian. Bertambahnya jumlah penduduk

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dan semakin meningkatnya permintaan jalan untuk menampung kegiatan lalu lintas dan tempat berhenti setelah sampai tujuan (parkir). Kurangnya lokasi untuk memarkirkan kendaraan tersebut berdampak pada penggunaan badan jalan sebagai lokasi parkir

Dalam perannya ketersediaan fasilitas serta pelayanan parkir merupakan tugas pemerintah kota pekanbaru sebagai wakil masyarakat kota pekanbaru dalam merespon suatu dampak yang timbul akibat kenaikan jumlah motoritas yang ada dikota pekanbaru namun dalam pelaksanaanya pemerintah kota pekanbaru bukan lah satu-satunya lembaga yang diharuskan melakukan pelayanan tersebut, mengingat pada dasarnya fungsi atau tugas pokok pemerintah adalah sebagai lembaga yang menentukan suatu kebijakan sedangkan pelaksanaan atau implementasi dari suatu kebijakan atau di laksanakan pemerintah secara bersama dengan masyarakat. Pergerakan penduduk di kota pekanbaru pada dasarnya dapat di golongkan pada sistem transportasi yang ada sekarang yaitu : pertama sistem pada angkutan umum. Ketergantugan transportasi dapat di lihat dari kepentingan atau kebutuhan dari yang melakukan pergerakan-pergerakan antara lokasi-lokasi kegiatan, yaitu penduduk sebagai subjek dari pergerakan tersebut.

Peranturan daerah nomor 14 tahun 2016 tentang retribusi parkir di tepi jalan umum. Pemerintah kota pekanbaru berusaha untuk meningkatkan pendapatan asli daerah kota pekanbaru dari sektor retribusi parkir dengan menetapkan badan jalan umum sebagai fasilitas parkir. Parkir di atur dalam perda nomor 14 tahun 2016 angka 35 menyebutkan parkir adalah keadaan tidak, bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Fasilitas parkir dalam peraturan daerah nomor 2 pasal 1 angka 38 menyebutkan fasilitas parkir pada badan jalan yaitu fasilitas parkir untuk kendaraan yang menggunakan sebagian badan jalan. Dengan meningkatnya jumlah kendaraan di kota pekanbaru, maka pemerintah daerah kota pekanbaru menetapkan badan jalan umum sebagai fasilitas parkir yang di punggut retribusinya kepada orang pribadi maupun umum.

Implementor dari perda No 14 tahun 2016 ini adalah perhubungan. Dan ini menyebabkan tidak tertibnya perparkiran dan semakin macet. Untuk meningkalkan pendapatan asli daerah melalui pemungutan retribusi, pemerintah daerah menetapkan target retribusi. (Rahman, 2018) adanya aktifitas pada pusat perdagangan akan mengakibatkan adanya bangkitan perjalanan, dari bangkitan perjalanan akan menimbulkan bangkitan parkir di daerah/kawasan perdagangan. Hal tersebut akan menumbuhkan lokasi-lokasi parkir baru di badan jalan *(on-street parking)* akibat dari parkir di badan jalan menyebabkan hambatan pergerakan arus lalu lintas pada ruas jalan dan besar.

Parkir dibedakan menjadi dua jenis yaitu : Parkir Legal dan Parkir Ilegal. Pada dasarnya kedua-duanya sama mengembankan tugasnya, parkir legal dikekola oleh Dinas Perhubungan sedangkan parkir ilegal biasanya dikelola oleh seseorang yang berkuasa di suatu wilayah tersebut. Berdasarkan wawancara terhadap salah seorang petugas UPTD parkir Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, parkir yang dikatakan legal adalah parkir yang telah mengikuti Standar operasi Prosedur, dan memiliki beberapa hal penting yang harus dikenakan oleh juru parkir seperti; baju

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

parkir,karcis, dan kartu tanda anggota (KTA). Bila beberapa hal tersebut tidak ada dikenakan oleh juru parkir maka parkir tersebut dapat dikatakan ilegal.

Bertambahnya jumlah penduduk dan semakin meningkatnya kepemilikan kendaraan di Kota Pekanbaru akan menimbulkan parkir-parkir ditepi badan jalan untuk menampung kegiatan lalu lintas dan tempat berhenti setelah sampai tujuan (parkir). Kurangnya lokasi untuk memarkirkan kendaraan tersebut berdampak pada penggunaan badan jalan dan area pendestrian sebagai lokasi parkir.

Penyelenggaraan dan pengelolaan parkiran berdasarkan peraturan daerah kota pekanbaru nomor 14 tahun 2016 tentang penyelenggaraan dan pengelolaan perparkiran adalah dinas perhubungan pada pasal 2 di jelaskan :

1. Penyelenggaraan dan pengelolaan tempat parkir umum, parkir khusus yang di kelola oleh swasta, pemerintah dan parkir yang di lakukan atau diawasi oleh pemerintah daerah dengan menunjuk dinas perhubungan atau instansi lainnya untuk melaksanakan tugas tersebut dengan keputusan wali kota.
2. Penyelenggaraan dan pengelolaan tempat parkir umum di badan jalan dapat di bagi beberapa kawasan khusus.
3. Ketentuaan lebih lanjut mengenai penetapan kawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 pasal ini di atur dalam peraturan wali kota.
4. Dinas perhubungan atau instansi lainnya dalam penyelenggaraan dan pengelolaan perparkiran melaksanakan tugas dan kewajiban serta

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan perparkiran kepada masyarakat yang meliputi kegiatan:

Diberbagai tepi jalan umum yang ada di Kota Pekanbaru seringkali ditemui juru parkir ilegal yang beroperasi di Kota Pekanbaru yang belum tentu berguna dalam hal membantu memarkir kendaraan padahal sistem perparkiran tepi jalan umum telah diserhkan secara langsung oleh pemerintah kota Pekanbaru kepada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru untuk mengatur dan mengelola secara baik berdasarkan perda No 14 Tahun 2016. Bahkan para pengguna lahan parkir tetap secara tidak langsung menyuburkan praktek-praktek parkir ilegal dengan memberikan uang kepada mereka. Mungkin saja ini pengaruh rasa takut terhadap juru parkir tersebut. Jika demikian halnya, maka apa bedanya dengan pemalakan terhadap pemilik kendaraan.

Semakin banyaknya bentuk pelanggaran masyarakat terhadap lalu lintas membuat pekerjaan pihak Dinas Perhubungan harus diemban dengan lebih baik. Sebenarnya penegakan hukum dalam berlalu lintas bukanlah hal yang diemban oleh pihak Dinas Perhubungan semata melainkan masyarakat seharusnya ikut ambil dalam menegakkan ketertiban berlalu lintas. Tanpa adanya kerja sama dari kedua belah pihak akan sulit untuk menekan angka pelanggaran lalu lintas ditengah masyarakat.

Kegiatan parkir ilegal juga semakin banyak dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dan hanya untuk mendapatkan keuntungan diri sendiri. Selain mengganggu kelancaran arus lalu lintas, keberadaan parkir ilegal

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

sebenarnya juga membuat keindahan tata kota berkurang. Hal ini dikarenakan seringnya kegiatan parkir yang dilakukan memakan badan jalan, sehingga kerapian tata kota yang diharapkan terganggu. Dan lebih dari hal tersebut, pendapatan yang didapat kerap kali masuk ke dalam kantong pribadi. Padahal sudah diberlakukan peraturan untuk kegiatan parkir tepi jalan agar memberi kontribusi juga terhadap pendapatan asli daerah. Sehingga target untuk pendapatan dari kegiatan parkir yang ditargetkan oleh pemerintah daerah sedikit banyak akan

Suburnya praktek parkir ilegal sepertinya dihalalkan oleh para pemilik kendaraan jika melihat banyaknya kendaraan yang terparkir dikawasan yang dilarang parkir. Hal ini disebabkan sistem pembayaran yang dihitung per jam saat ini masih sangat membebani dan terkesan tidak manusiawi bahkan tidak adanya ketegasan sanksi hukum yang kuat terhadap pengelola parkir yang menetapkan tarif standar yang telah ditetapkan.

Dari masalah yang dipaparkan diatas peneliti menemukan beberapa fenomena permasalahan:

1. Terindikasi bahwa dalam pengelolaan parkir oleh dinas perhubungan belum turun langsung kelapangan dalam pengelolaan parkir sehingga masih ditemukan terjadi fluktuatif penerimaan retribusi parkir dijalan umum yang selayaknya pembayaran seperti roda dua sebanyak 1000 rupiah sampai dengan 2000 rupiah dan Mobil 2000 sampai dengan 4000 pembayarannya, hal ini yang disebabkan petugas parkir yang tidak menyetor bukti atau karcis

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

parkir kepada pihak Dinas Perhubungan sehingga dinas perhubungan hanya menerima apa yang diberikan oleh petugas parkir.

2. Terindikasi masih terdapat petugas parkir yang cenderung tidak memberikan karcis pada pengguna parkir umum.

Berdasarkan dari latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik ingin mengangkat judul penelitian ini adalah **“** Evaluasi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dalam Menertibkan Parkir Ilegal Di Kota Pekanbaru.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana **Evaluasi Kebijakan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dalam Menertibkan Parkir Ilegal Di Kota Pekanbaru**

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan peneliti ini untuk :

a. Untuk mengetahui kebijakan dinas perhubungan dalam menertibkan parkir ilegal dikota pekanbaru khususnya di kecamatan kota pekanbaru.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

b. Untuk mengetahui hambatan dalam penertiban parkir ilegal yang ada di kota pekanbaru khususnya kecamatan kota pekanbaru

2. Kegunaan Penelitian

Sedangkan kegunaan penelitian ini antara lain :

a. Dapat dijadikan sebagai bahan referensi mengenai untuk penelitian lanjutan yang membahas mengenai evaluasi kebijakan dinas perhubungan dalam menertibkan parkir ilegal di kota pekanbaru
b. Sebagai bahan masukan dan informasi bagi pemerintah kota pekanbaru khususnya yang mengenai masalah parkir ilegal di kota pekanbaru

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

1.Konsep Pemerintahan

Konsep pemerintahan dapat dibuat dalam arti luas dan arti sempit yang maknanya tugas dan wewenang pemerintah itu dapat diperluas dan dipersempit, dengan membentuk organ-organ atau badan-badan dalam pemerintahan itu sendiri.Istilah pemerintah berasal dari kata perintah, dalam konteks ini ndraha menyatakan bahwa istilah perintah secara umum dimaknai sebagai kegiatan menyeluruh untuk melakukan sesuatu atau sesuatu ynag harus dilakukan.

Kata pemerintahan berasal dari kata dasar dari perintah yang berarti melakukan pekerjaan menyuruh, yang memiliki 4 unsur yaitu terdiri dari dua pihak unsur yang di perintah yaitu rakyat, unsur pemerintah itu sendiri dan antara keduanya ada hubungan. Setelah mendapat awalan ‘P’ menjadi pemerintah yang berarti badan atau organisasi mengurus. Setelah di tambah akhiran ‘an’ menjadi pemerintahan menjadi perbuatan cara atau perihal. Syafie dan Andi Azikin,(2008:15)

Menurut Napitupulu (2007;9) istilah pemerintah mengandung arti lembaga atau organisasi yang menjalankan kekuasaan pemerintah, sedangkan pemerintah adalah proses berlangsungya kegiatan atau perbuatan pemerintah dalam mengatur kekuasaan suatu negara. Dengan demikian pemerintah dapat diartikan sebagai

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

orang, dadan atau aparat yang mengeluarkan atau memberi perintah (dalam Napitupulu,2007;7)

Pemerintah dalam paradigma lama memiliki objek material yaitu Negara sehingga pemerintah berorientasi pada kekuasaan, namun dalam paradigma baru pemerinahan di pandang memiliki objek materialnya masyarakat, sehingga pemerintahanndimaknai sebagai suatu cara untuk menata kekola kehidupan masyarakat dalam suatu pemerintahan/negara. (Yusri Munaf 2016:47)

Kemudian menurut Wirjono Prodjodikoro (dalam Munaf,2016:77) menyatakan bahwa pemerintah dalam arti luas meliputi seluruh fungsi kegiatan kenegaraan yaitu lembaga-lembaga kenegaraan yang diatur secara langsung oleh UUD 1945 yaitu lembaga eksekutif,legislatif,yudikatif. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit adalah fungsi kegiatan kenegaraan yang dilakukan oleh presiden/eksekutif.

Sedangkan pengertian menurut Ryaas Rasyd (dalan Giroth 2004:65) adalah apa yang dilakukan oleh pemerintah, selanjutnya pemerintahan dimaknai sebagai proses yang adil berdasarkan hukum kepada setiap pribadi warga negara, memberi pelayanan bagi kemajuan bangsa bersama. Selanjutnya tugas pokok pemerintah dapat diringkas menjadi 3 fugsi yang hakiki, yakni:

a. Pelayanan (service)
b. Pemberdayaan (empowerment)
c. Pembangunan (development)

Oleh karena itu pemerintah memiliki tiga fungsi yng hakiki, yang merupakan penjabaran dari tugas pokok pemerintah, ketiga fungsi tersebut harus dilakukan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

secara bersamaan oleh pemerintah karena ketiganya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya.

Pemerintah dalam bahasa inggris di sebut *government* yang berasal dari bahasa latin *gobernate, greek gibernen* yang berarti mengemudikan, atau mengendalikan. Menurut Awang dan Mendra Wijaya (2012:6) pemerintah adalah sebuah badan yang menetapkan dan melaksanakan kebijakan publik dan gerakan kekuasaan eksekutif, polotik berdaulat melalui adat istiadat, institusi dan hukum dalam sebuah negara.

Menurut Woodrow Wilson (dalam syafie dan andi azikin,2008:9) pemerintah dalam akhir uraian adalah suatu pengorganisasian kekuatan, namun tidak selalu berhubungan dengan organisasi kekuatan angkatan bersenjata. Pemerintah adalah orang yang berwewenang memproses pelayanan publik dan memproses pelayanan sipil bagi setiap orang yang melakukan hubungan pemerintah, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat di perlukan, sesuai dengan tuntutan (harapan) yang diperintah.

Menurut syafiie dan andi azikin (dalam rahman, 2009;2) pemerintahanyaitu sekelompok orang tertentu yang secara baik dan benar serta indah melakukan sesuatu dalam mengkordinasikan memimpin dalam hubungan antara dirinya dan masyarakat, strong mengatakan bahwa pemerintah dalam arti luas mempunyai kewenangan untuk memelihara kedamaian dalam keamanan negara, kedalam dan keluar. Oleh karenaitu harus :

1. Harus mempunyai kekuatan militer atau kemampuan untuk mengendalikan angkatan perang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2. Harus mempunyai kekuatan legislatif atau dalam arti pembuatan undang-undang

Sedangkan menurut Rosenthal (dalam syafiie 2007;34) ilmu pemerintahan di artikan sebagai ilmu yang menggeluti studi tentang kinerja internal dan eksternal dari struktur-struktur dan proses-proses pemerintahan umum. Menurut david apter (dalam Syafiie dan Andi Azikin 2008;9) pemerintah merupakan satuan anggota yang paling umum yang memiliki (a) tanggung jawab tertentu untuk mempertahankan system yang mencakupnya dan (b) monopoli praktis mengenai kekuasaan paksaan.

Ndraha (2003;5) mempunyai pendapat pemerintahan adalah sebuah system multi proses yang betujuan memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan yang di perintah akan jasa public dan layanan sipil

Kemudian di dalam Al-qur'an juga di jelaskan memiliki definisi terhadap pengertian pemerintah yang terdapat pada surat ke 3 ayat 104 di mana di jelaskan bahwa yang di maksud dengan pemerintahan adalah segolongan orang yang mengajak kebaikan dan mengajak pada kebenaran, melarang dari hal buruk, itulah yang beruntung (dalam Syafiie dan Azikin, (2008;10).

Selanjutnya H.A Brasz (dalam Syafiie,2011;6) bependapat bahwa ilmu pemerintahan dapat di artikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang cara bagaimana lembaga pemerintah umum itu di susun dan di fungsikan baik secara kedalam maupun keluar terhadap warganya .

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Mac Iver (dalam Syafiie dan Andi Azikin 2008;8) menjelaskan bahwa pemerintahan adalah sebuah ilmu pemerintahan adalah sebuah ilmu tentang bagaimana manusia-manusia dapat di perintah.

Menurut U.Roesenthal (dalam Syafiie 2005;21) ilmu pemerintahan adalah yang mengetahui studi tentang penunjukan cara kerja kedalam dan keluar struktur dan pemerintahan umum.

Ndraha (2003;428) menyatakan pemerintah terlebih dahulu sebagai suatu kegiatan atau proses peqwnyediaan dan distribusi pelayanan public yang tidak dapat privatisasikan dan layanan civil kepada setiap orang pada saat di butuhkan, pelaku kegiatan itulah yang di sebut dengan perintah.

2.Konsep Evaluasi

Menurut bahasa, kata evaluasi berasal dari bahasa inggris "evaluation" yang berarti penilaian atau penaksiran, sedangkan menurut pengertian istilah evaluasi merupakan kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan sesuatu obyek dengan menggunakan instrument dan hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur memperoleh kesimpulan. Banyak sekali pendapat para ahli tentang pengertian evaluasi diantaranya :

Evaluasi biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektivan kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan kepada konstituennya. Sejauh mana tujuan dicapai serta untuk melihat sejauhmana kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Menurut Anderson dalam Winarno (2011:166), secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak pelaksanaan kebijakan tersebut

Menurut kamus besar Indonesia, evaluasi adalah suatu penilaian dimana penilaian itu ditujukan pada orang yang lebih tinggi atau yang lebih tahu kepada orang yang lebih rendah, baik itu dari jabatan strukturnya atau orang yang lebih rendah keahliannya. Evaluasi adalah suatu proses penelitian positif dan negatif atau juga gabungan dari keduanya (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2010: 45).

Pada umumnya evaluasi adalah suatu pemeriksaan terhadap pelaksanaan suatu program yang telah dilakukan dan yang akan digunakan untuk meramalkan, memperhitungkan, dan mengendalikan pelaksanaan program ke depannya agar jauh lebih baik. Evaluasi lebih bersifat melihat ke depan dari pada melihat kesalahan-kesalahan dimasa lalu, dan ditujukan pada upaya peningkatan kesempatan demi keberhasilan program. Dengan demikian misi dari evaluasi itu adalah perbaikan atau penyempurnaan di masa mendatang atas suatu program.

Pendapat selanjutnya menurut Arikunto (2010:1), evaluasi sebagai sebuah proses menentukan hasil yang telah dicapai dari beberapa kegiatan yang direncanakan untuk mendukung tercapainya tujuan.

Evaluasi adalah suatu usaha untuk mengukur dan sumber nilai secara objektif dari pencapaian hasil-hasil yang direncanakan sebelumnya, dimana hasil evaluasi tersebut dimaksudkan menjadi umpan balik untuk perencanaan yang akan dilakukan di depan (Yusuf, 2010: 3). Dalam hal ini Yunus menitikberatkan kajian evaluasi dari segi manajemen, dimana evaluasi itu merupakan salah satu fungsi

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

atau unsur manajemen, yang misinya adalah untuk perbaikan fungsi atau sosial manajemen lainnya, yaitu perencanaan.

Menurut Taliziduhu Ndraha (2010:201) bahwa evaluasi merupakan proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisa hasilnya.

Evaluasi adalah penilaian secara sistemik untuk menentukan atau menilai kegunaan, keefektifan sesuatu yang didasarkan pada kriteria tertentu dari program. Evaluasi harus memiliki tujuan yang jelas, sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dalam program/peraturan. Ada tiga elemen penting dalam evaluasi yaitu (1) kriteria/pembanding yaitu merupakan ciri ideal dari situasi yang diinginkan yang dapat dirumuskan melalui tujuan operasional, (2) bukti /kejadian adalah kenyataan yang ada yang diperoleh dari hasil penelitian, dan (3) penilaian *(judgement)* yang dibentuk dengan membandingkan kriteria dengan kejadian (Sutjipta, 2012:92).

Kesimpulannya yaitu perbandingan antara tujuan yang hendak dicapai dalam penyelesaian masalah dengan kejadian yang sebenarnya, sehingga dapat disimpulkan dengan analisa akhir apakah suatu kebijakan harus direvisi atau dilanjutkan. Wirawan (2012: 16-18) membedakan jenis-jenis evaluasi berdasarkan objeknya menjadi beberapa jenis yaitu:

a. Evaluasi Kebijakan. Kebijakan adalah rencana umum dalam rangka melaksanakan fungsi dan tugas. Kebijakan akan berlangsung terus sampai dicabut atau diganti dengan kebijakan yang baru; umumnya karena kebijakan yang lama tidak efektif dan efisien atau karena terjadinya pergantian pejabat dan pejabat baru mempunyai kebijakan yang berbeda dengan pejabat sebelumnya. Istilah lainnya ialah analisis kebijakan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Analisis kebijakan adalah menentukan atau memilih satu alternatif kebijakan yang terbaik dari sejumlah alternatif kebijakan yang ada. Sedangkan evaluasi kebijakan adalah menilai kebijakan yang sedang atau telah dilaksanakan.

b. Evaluasi Program. Program adalah kegiatan atau aktivitas yang dirancang untuk melaksanakan kebijakan dan dilaksanakan untuk waktu yang tidak terbatas. Evaluasi program; Metode sistematis untuk mengumpulkan, menganalsisis, dan memakai informasi untuk menjawab pertanyaaan dasar. Evaluasi Program dapat dikelompokan menjadi evaluasi proses *(process evaluation),* evaluasi manfaat (outcome *evaluation)* dan evaluasi akibat (*impact evaluation*).

c. Evaluasi Proyek. Evaluasi proyek sebagai kegiatan atau aktivitas yang dilaksanakan untuk jangka waktu tertentu untuk mendukung pelaksanaan program.

d. Evaluasi Material. Evaluasi material, untuk melaksanakan kebijakan, program atau proyek diperlukan sejumlah material atau produk-produk tertentu. Misalnya, untuk melaksanakan program Bus Way diperlukan bus dengan kualitas tertentu: nyaman, memuat banyak penumpang, tahan lama, hemat bahan bakar, dan biaya pemeliharaannya yang murah. Oleh karena itu, bus yang dipergunakan Bus Way dievaluasi dengan kriteria tersebut.

e. Evaluasi Sumber Daya Manusia (SDM). Evaluasi sumber daya manusia atau yang yang dikenal dengan evaluasi kinerja di lakukan untuk

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

mengetahui pengembangan sumber saya manusia atau *human resources development.* Evaluasi sumber daya manusia dapat dilaksanakan disebuah lembaga pendidikan, lembaga pemerintah, bisnis dan lembaga swadaya masyarakat.

Evaluasi dilaksanakan untuk mencapai berbagai tujuan sesuai dengan obyek evaluasinya. Menurut Wirawan (2012: 22-23) ada beberapa tujuan evaluasi di antaranya adalah:

a. Mengukur pengaruh program terhadap masyarakat.
b. Menilai apakah program telah dilaksanakan sesuai rencana.
c. Mengukur apakah pelaksnaan program sesuai dengan standar.
d. Evaluasi program dapat mengidentifikasi dan menentukan manadimensi program yang jalan, mana yang tidak berjalan.
e. Pengembangan staf program.
f. Memenuhi ketentuan undang-undang.
g. Akreditasi program.
h. Mengukur *cost effectifenis dan cost efficiency.*
i. Mengambil keputusan mengenai program.
j. Akuntabilias.
k. Memberikan balikan kepada pimpinan dan program.
l. Mengembangkan teori evaluasi dan riset evaluasi.

Menurut Dunn dalam Suharto (2011:28), beberapa istilah yang serupa dengan evaluasi dan intinya masih berhubungan erat atau masih mencakup evaluasi itu sendiri yaitu:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

a. *Measurement,* pengukuran yang diartikan sebagai suatu proses kegiatan untuk menentukan luas atau kuantitas untuk mendapatkan informasi atau data berupa skor mengenai prestasi yang telah dicapai pada periode tertentu dengan menggunakan berbagai teknik dan alat ukur yang relevan.

b. *Test,* secara harfiah diartikan suatu alat ukur berupa sederetan pertanyaan atau latihan yang digunakan untuk mengukur kemampuan, tingkah laku, potensi-potensi sebagai hasil pembelajaran.

c. *Assessment,* Suatu proses pengumpulan data atau pengolahan data tersebut menjadi suatu bentuk yang dapat dijadikan bahan pengambilan keputusan.

Berdasarkan evaluasi diatas, maka terkait dengan konteks penelitian ini, peneliti mencoba untuk mengevaluasi pelaksanaan Perda Kota Pekanbaru Nomor 14 tahun 2016 tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum.

3.Konsep Kebijakan

Pemerintah memiliki wewenang untuk mengeluarkan kebijakan agar program-program pembangunan, pelayanan dan pemberdayaan serta tujuan berdirinya negara dapat tercapai.menurut Partowidagdo dalam Anwar (2011 : 42) model kebijakan adalah rekonstruksi bantuan untuk menata secara imajinatif dan menginterprestasikan pengalaman-pengalaman keadaan bermaslah untuk mendeskripsikan menjelaskan dan meramalkan aspek-aspek dengan maksud memecahkan permasalahan manfaatnya. Pertama, karena kebijakan public merupakan proses yang kompleks, karena itu sifat model yang menyederhanakan realitas akan sangat membantu delam memahami realitas yang kompleks itu.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Kedua, sifat alamiah manusia tidak mampu memahami realitas yang kompleks tanpa menyederhanakan terlebih dahulu.

Pengertian Policy atau kebijakan, Donovan dan Jackson dalam Keban (2012:55) menjelaskan bahwa policy dapat dilihat secara filosofis, sebagai suatu produk, sebagai suatu proses dan sebagai kerangka kerja. Sebagai suatu konsep filosofis, kebijakan merupakan serangkaian prinsip atau kondisi yang diinginkan; sebagai suatu produk, kebijakan dipandang sebagai serangkaian kesimpulan atau rekomendasi; sebagai suatu proses, kebijakan dipandang sebagai suatu cara dimana melalui cara tersebut suatu organisasi dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya yaitu program dan mekanisme dalam mencapai produknya dan sebagai kerangka kerja, kebijakan merupakan suatu proses tawar menawar dan negoisasi untuk merumuskan isu-isu dan metode implementasinya.

Kebijakan menurut para ahli seperti yang telah dikemukan oleh Anderson dalam Winarno (2012:21) mendefinisikan sebagai berikut: "kebijakan adalah arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang actor atau sejumlah actor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan

Sementara James E. Anderson dalam Wahab (2011:2), memberikan rumusan kebijakan sebagai perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Pendapat yang lain adalah dari Carl Friedrich dalam Wahab (2011:2) yang menyatakan bahwa kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Dari beberapa pengertian tentang kebijakan yang telah dikemukakan oleh para ahli tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pada hakekatnya studi tentang policy (kebijakan) mencakup pertanyaan : what, why, who, where, dan how. Semua pertanyaan itu menyangkut tentang masalah yang dihadapi lembagalembaga yang mengambil keputusan yang menyangkut; isi, cara atau prosedur yang ditentukan, strategi, waktu keputusan itu diambil dan dilaksanakan.

Menurut (Kansil dan Christine 2012:190) kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan, atau petunjuk bagi setiap usaha dan aparatur pemerintah sehingga tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai tujuan tertentu.

Menurut (Syafiie 201 :150) menyatakan "Model kebijakan yang sesuai dengan situasi sekarang ini adalah model system dimana memperhatikan desakan-desakan lingkungan yang anatara lain berisi tuntunan, dukungan, hambatan, tantangan, gangguan, rintangan, ujian, kebutuhan atau keperluan dan lain-lain yang mempengaruhi public polic, bukan sebaliknya, mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok".

Kebijakan pemeritah menurut ndraha (2005;498) adalah suatu usaha untuk memproses nilai pemerintahan yang bersumber pada kearifan pemerintahan dan mengikat seca formal, etik dan moral, diarahkan guna menepati pertanggung-jawaban pemerintah dalam lingkungan pemerintah.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Menurut koryati (2005;7) secara umum dapat dikatakan sebagai rumusan keputusan pemerintah yang menjadi pedoman tingkah laku guna mengatasi masalah publik yang mempunyai tujuan,rencana, dan program yang akan dilaksanakan secara jelas.

Nugroha (2004;7) menjelaskan bahwa rumusan kebijakan adalah inti dari kebijakan publik yang dilihat dari kebijakan publik yang ditujukan untuk melakukan intervensi terhadap kehidupan publik untuk meningkatkan kehidupan publik itu sendiri yang dinilai dari ketersediaan kemampuan sumberdaya manusia.

Tangkilisanmengatakan bahwa pembuatan kebijakan merupakan sebuah aktifitas yang diarahkan tujuan sebagai yang dimiliki ciri tersendiri dari aktifitas fisik dan ekpresif murni bertujuan untuk mempengaruhi prospektif (masa depan) alternatif arah yang dikehendaki.

Menurut (Wahab, 2011:3) kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu secara mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

4.KonsepParkir

Parkir liar merupakan parkir yang muncul secara ilegal atau tidak resmi dengan lahan parkir secara sepihak, tidak berada dalam pembinaan pemerintah kabupaten atau kota. parkirialah tempat pemberhentian kendaraan baik motor maupun mobil. Setiap pengendara kendaraan bermotor memiliki kecendrungan untuk mencari tempat untuk memarkirkan kendarannya sedekat mungkin dengan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

tepat kegiatan atau aktifitasnya. Sehingga tempat-tempat terjadinya suatu kegiatan misalnya seperti tempat kawasan pariwisata diperlukan areal parkir. Pembangunan sejumlah gedung atau tempat-tempat kegiatan umum sering kali tidak menyediakan area parkir yang cukup sehingga berakibat penggunaan sebagian lebar badan jalan untuk parkir kendaraan.

Parkir adalah setiap kendaraan yang berhenti pada tempat-tempat tertentu. PP No.43 tahun 1993 menjelaskan definisi parkir adalah suatu keadaan dimana kendaraan tidak bergerak dalam jangka waktu tertentu atau tidak bersifat sementara.

Dalam Peraturan daerah kota pekanbaru nomor 14 tahun 2016 tentang retribusi parkir di tepi jalan umum, Bahwa retribusi parkir pelayanan parkir ditepi jalan umum adalah salah satu penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu diperlukan ketentuan yang dapat memberikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam hal pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum.

Bahwa dalam materi muatan peraturan daerah kota pekanbaru no 3 tahun 2009 tentang retribusi pelayanan di bidang darat, terhadap pengaturan mengenai retribusi parkir ditepi jalan umum yang sudah tidak sesuai lagi dengan undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah serta perkembangan saat ini, sehingga perlu ditinjau kembali.

5. Konsep Penataan dan Pembinaan

Penataan merupakan suatu proses perencanaan dalam upaya meningkatkan keteraturan, ketertiban, dan keamanan. Penataan menjadi bagiaan dari suatu proses penyelenggaraan pemerintah dimana dalam proses penataan tersebut dapat menjamin terwujudnya tujuan pembangunan nasional. Secara umum pembinaan di

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

sebut sebagai sebuah perbaikan terhadap pola ia memiliki tujuan hidup tertentu dan ia memiliki keinginan untuk mewujudkan tujuan tersebut. Apabila tujuan hidup tersebut tidak tercapai maka manusia akan berusaha untuk menata ulang pola kehidupannya.Miftah Thoha (1997:8) pembinaan adalah suatu tindakan hasil atau pernyataan menjadi lebih baik. Dalam hal menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan, pertumbuhan, evolusi atas berbagai kemungkinan berkembang atas sesuatu.

Ada dua unsur dari pengertian ini yakni pembinaan itu sendiri bisa berupa suatu tindakan, proses atau pernyataan dari suatu tujuan, dan kedua pembinaan itu bisa menunjukkan pada perbaikan atas sesuatu.Santoso (1995:52) pembinaan adalah usaha memelihara, melatih, dan meningkatkan manjadi lebih baik lagi. Pembinaan disiplin kerja pegawai adalah rangkaian usaha untuk melatih dan meningkatkan sikap kesediaan pegawai menaati peraturan yang berlaku.Manullang (2009:11) pembinaan adalah usaha memberi bimbingan saran perintah-perintah atau intruksi kepada bawahannya dalam melaksanakan tugas masing-masing agar tugas dapat dilaksanakan dengan baik dan benar-benar tertuju pada tujuan yang telah ditetapkan semula.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

1. Penelitian Syariah Ayundya Widiatuti 2017. Masalah yang dikaji dalam penelitian tersebut berfokus pada penataan aktifitas parkir dan pedagang kaki lima pada koridor jalan gajah mada. Karena, koridor jalan Gajah Mada merupakan salah satu jalur dengan tingkat kepadatan yang cukup tinggi. Koridor jalan Gajah Mada memang diperuntukkan bagi perdagangan dan jasa. Namun akibat dari kondisi parkir dan PKL yang tidak teratur menimbulkan kemacetan.
2. Penelitian Deddy mahotama ellywati 2015, masalah yang dikaji dalam penelitian tersebut berfokus pada tata letak fasilitas parkir sepeda motor di stasiun kereta api karena jumlah kebutuhan parkir lebih besar dari pada fasilitas parkir yang ada, sehingga kendaraan yang tidak tertampung dalam tempat parkir menganggu ruas jalan sekitar sekitarnya.
3. Penelitian Susunna Br Taringan 2014 masalah yang dikaji dalam penelitian tersebut berfokus pada tata letak dan kapasitas parkir kendaraan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

sepeda motor di Universitas Atma Jaya Yogyakarta Kampus III. Karena pada saat jam-jam berkunjung terjadi lonjakan kebutuhan ruang parkir, penataan pola parkir yang kurang teratur mengakibatkan ruang parkir yang tidak optimal.

Dari ketiga penelitian terdahulu terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Persamaan peneliti terdapat pada pendekatan yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan kualitatif. Persamaan lainnya terdapat pada jenis penelitian yang digunakan. Jenis penelitian yang digunakan peneliti yaitu menggunakan jenis penelitian deskriptif. Hal ini yang serupa juga terdapat pada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan.

Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengambil judul **"Evaluasi Kebijakan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dalam Menertibkan Parkir Ilegal Di Kota Pekanbaru"**. penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penertiban parkir oleh UPTD Dishub Kota Pekanbaru. selain itu teori yang digunakan peneliti khusus untuk mengevaluasi penertiban parkir ilegal. Peneliti menggunakan teori suharto serta memfokuskan penelitian pada evaluasi penertiban parkir ilegal oleh UPTD Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

C. Kerangka Berfikir

Berdasarkan dari variabel penelitian Evaluasi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dalam Menertibkan Parkir Ilegal Di Kota Pekanbaru

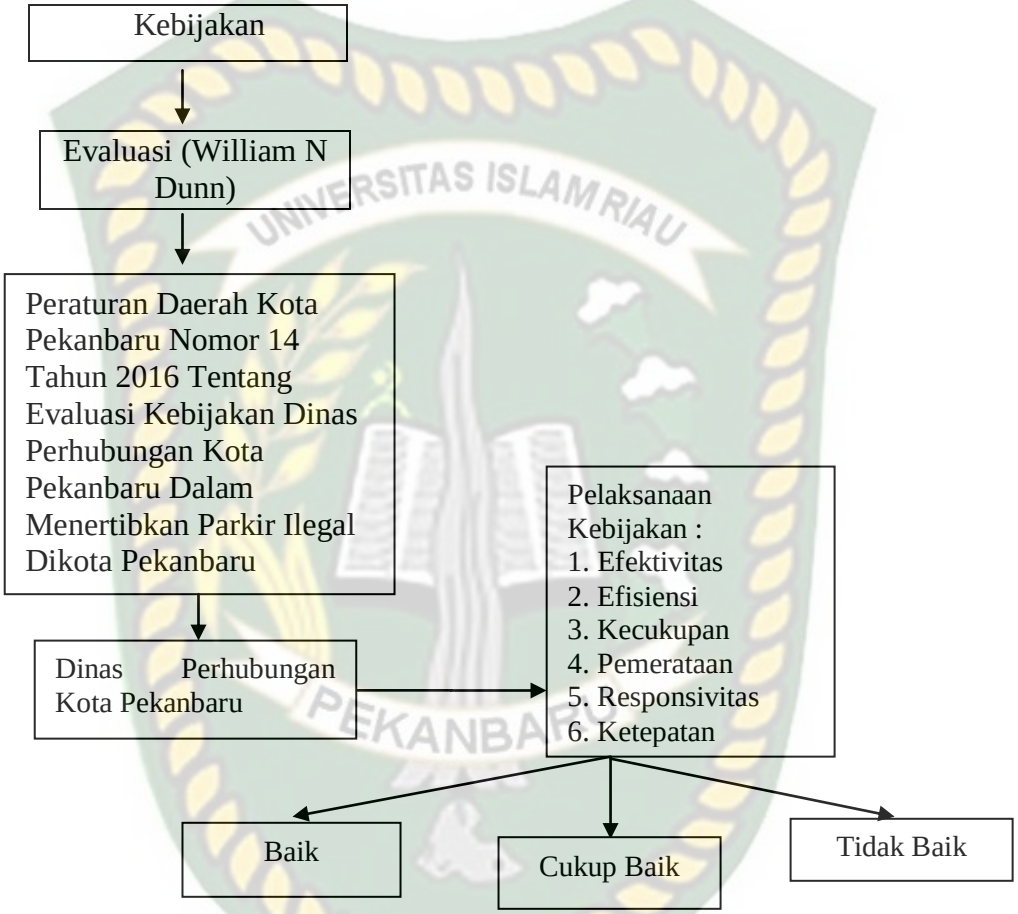

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

D.Konsep Operasional

Maka untuk memudahkan analisa data dan untuk menghindari kesalahan dalam pelaksanaan penelitian ini, maka penulis perlu membuat konsep operasional agar pembaca mudah memahami maksud dan tujuan penulis ini, diantaranya :

i. Kebijakan dalam penelitian ini adalah bentuk pencapaian tujuan pelaksanaan parkir dalam penyelenggaraan parkir yang berdasarkan peraturan yang ditetapkan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru
ii. Evaluasi adalah suatu penilaian dimana penilaian itu ditunjukkan pada orang, baik itu dari jabatan strukturnya atau keahliannya, dengan mengidentifikasikan mengenai pelaksanaan atau penerapan kebijakan kearah yang lebih baik.
iii. Pelaksanaan dalam penelitian ini adalah dimana Dinas Perhubungan dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya.
iv. Peraturan daerah dalam penelitian ini adalah peraturan tentang penyelenggaraan dalam pengelolaan parkir di kota pekanbaru
v. Penyelenggaraan dan pengelolaan parkir adalah dinas perhubungan dengan menetapkan lokasi parkir yang dikelola melalui masyarakat yang ditugaskan agar terciptanya keamanan dan kenyamanan kendaraan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

E. Operasional Variabel

Tabel ll. 1 : Evaluasi Kebijakan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dalam Menertibkan Parkir Ilegal Di Kota Pekanbaru

Konsep	Variable	Indikator	Item Penilaian	Skala
1	2	3	4	5
Evaluasi ialah penaksiran pemberian angka dan penilaian kata-kata yang menyatakan usaha yang untuk menganalisis hasil kebijakan, nilai atau hasil manfaat hasil kebijakan. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa yaitu kebijakan atau program telah dicapai tingkat kinerja yang bermakna yang berarti bahwa masalah-masalah kebijakan dibuat jelas dan diatasi (Dunn 2003 :608)	Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Evaluasi Kebijakan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dalam Menertibkan Parkir Ilegal Di Kota Pekanbaru.	Efektivitas	1. Penetapan Peraturan 2. Pemberian Parkir 3. Menetapkan besar tarif parkir	Baik Cukup baik Kurang baik
		Efisiensi	1. Pelaksanaan ketertiban 2. Penetapan kegiatan 3. Sasaran pelaksanaan kegiatan	Terlaksana Cukup terlaksana Kurang terlaksana
		Kecukupan	1. Kerjasama antara atasan dan bawahan 2. pendapatan terhadap lokasi parkir 3. pendapatan terhadap parkir	Terlaksana Cukup terlaksana Kurang terlaksana
		Perataan	1. Pelayanan terhadapkepemilikan kendaraan parkir 2. Penetapan biaya parkir 3. Pemberian sanksi	Terlaksana Cukup terlaksana Kurang terlaksana
		Responsivitas	1. Penetapan ketertiban parkir 2. Melaksanakan kenyamanan 3. Menyediakan sarana parkir	Terlaksana Cukup terlaksana Kurang Terlaksana

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

		Ketepatan	1. Terciptanya arah kinerja 2. Penetapan peratuan 3. Melakukan pengawasan	Terlaksana Cukup terlaksana Kurang terlaksana

Sumber : Olahan Data penelitian, 2021

F. T EKNIK PENGUKURAN

Untuk mengetahui bagaimana Evaluasi Kebijakan Dishub Kota Pekanbaru Dalam Menertibkan Parkir Ilegal Di Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2016 yang diberi pengukuran dengan melakukan klasifikasi penilaian sebagai berikut :

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kotapekanbaru Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Evaluasi Kebijakan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dalam Menertibkan Parkir Ilegal Di Kota Pekanbaru dikatakan :

Terlaksana : maka semua indikator pada kategori terlaksana pada rentang persentase 67%-100%

Cukup Terlaksana : jadi semua indikator pada kategori kurang terlaksana berada pada rentang persentase 34%-66%

Kurang Terlaksana: Apabila semua indikator pada kategori cukup terlaksanaberada pada rentang persentase 0%-33%

Apapun pengukuran indikator sebagai berikut :

1. Efektivitas, dikatakan :

   Terlaksana : jadi indikator pada kategori terlaksana berada pada rentang persetase 67%-100%

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Cukup Terlaksana : maka indikator pada kategori kurang terlaksana berada pada rentang persentase 34%-66%

Kurang Terlaksana: jadi semua indikator pada kategori cukup terlaksana berada pada rentang persentase 0%-33%

2. Efisiensi dikatakan :

Terlaksana : maka indikator pada kategori terlaksana berada pada rentang persetase 67%-100%

Cukup Terlaksana : Apabila indikator pada kategori kurang terlaksana berada pada rentang persentase 34%-66%

Kurang Terlaksana: Apabila semua indikator pada kategori cukup terlaksana berada pada rentang persentase 0%-33%

3. Kecukupan dikatakan :

Terlaksan : jadi indikator pada kategori terlaksana berada pada rentang persetase 67%-100%

Cukup Terlaksana : maka indikator kategori kurang terlaksana berada pada rentang persentase 34%-66%

Kurang Terlaksan : jadi semua indikator pada kategori cukup terlaksana berada pada rentang persentase 0%-33%

4. Pemerataan dikatakan :

Terlaksana : Apabila indikator pada kategori terlaksana pada rentang persetase 67%-100%

Cukup Terlaksana : yaitu indikator pada kategori kurang terlaksana pada rentang persentase 34%-66%

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Kurang Terlaksana : maka semua indikator kategori cukup terlaksana pada rentang persentase 0%-33%

5. Responsivitas dikatakan :

Terlaksana : Apabila indikator pada kategori terlaksana berada pada rentang persetase 67%-100%

Cukup Terlaksana: Apabila indikator pada kategori kurang terlaksana berada pada rentang persentase 34%-66%

Kurang Terlaksana: Apabila semua indikator pada kategori cukup terlaksana berada pada rentang persentase 0%-33%

6. Ketepatan dikatakan :

Terlaksana : maka indikator pada kategori terlaksana berada pada rentang persetase 67%-100%

Cukup Terlaksana : jadi indikator pada kategori kurang terlaksana padarentang persentase 34%-66%

Kurang Terlaksana : maka semua indikator kategori cukup terlaksana berada pada rentang persentase 0%-33%

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe survey deskriptif dimana penulis akan menggunakan kondisi objektif yang ditemui dilapangan berdasarkan data-data yang berkaitan dengan masalah dalam evaluasi kebijakan dinas perhubungan kota pekanbaru dalam menertiban parkir ilegal dikota pekanbaru khususnya di kecamatan pekanbaru kota maka dari penelitian ini menggunakan tipe Kuantitatif.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dengan pertimbangan bahwa banyaknya parkir ilegal yang beroperasional di Kota Pekanbaru, sehingga dengan memilih lokasi ini diharapkan agar dinas perhubungan lebih tegas lagi dalam melaksanakan penertiban parkir ilegal dikota pekanbaru khususnya kecamatan kota pekanbaru.

C. Populasi dan Sampel

Populasi adalah unit analisis atau wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditetapkan jumlahnya.Sampel adalah sebagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh pupulasi tersebut.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Adapun jumlah populasi dan sampel dalam penelitian ini akan diambil dari aparatur Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, untuk mengetahui lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel.lll.1. Populasi dan Sampel

No	Sub populasi	Populasi	Sampel	Persentase
1	Kepala Dinas Perhubungan	1	1	100%
2	UPTD Parkir	1	1	100%
3	Responden penelitian	41	41	100%
Jumlah :		43	43	100%

Modifikasi penulis: 2021

D. Teknik Penarikan Sampel

Dalam memperoleh penarikan sampel untuk penelitian ini adalah *Random Sampling* untuk aparatur pemerintah yaitu seluruh populasi yang ada dijadikan sampel penelitian dengan alasan jumlah sampel yang relative sedikit dan berada dalam satu tempat dan untuk seksi ketertiban umum dan staff digunakan teknik Random sampling.

E. Jenis dan Sumber Data

1. **Data Primer**

Data primer merupakan kata-kata atau tindakan orang yang diamati atau di wawancarai. Data primer ini digunakan sebagai data utama dalam penelitian ini ,didalam data primer ini berasal dari informan atau narasumber yang diwawancarai oleh penulis.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2. **Data Sekunder**

Sedangkan data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari arsip-arsip dan catatan-catatan yang terdapat pada kantor atau instansi yang terkait dengan masalah penelitian. Adapun data sekunder yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah berupa undang-undang serta sumber-sumber lain yang dibutuhkan dan berkaitan dengan penelitian.

F. Teknik pengumpulan data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian studi kasus seperti ini, yaitu : kuisioner, observasi, wawancara, dokumentasi dan pengamatan langsung, pengamatan serta bukti fisik. Sebagai konsekuensi dari karakter studi kasus tersebut, semua teknik pengumpulan data yang mungkin dan relevan dengan pertanyaan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi :

1. Observasi

Observasi yaitu Pengumpulan data yang dilakukan dengan melihat dan mengamati secara langsung peristiwa atau kejadian melalui cara yang sistematik. Teknik ini akan membawa peneliti untuk dapat menangkap arti fenomena dari segi pengertian subjek penelitian, dan dapat merasakan apa yang dirasakan serta dihayati oleh subjek penelitian sehingga meyakinkan peneliti bahwa subjek tersebut dapat menjadi sumber data bagi peneliti.

2. Wawancara

Wawancara yaitu bentuk komunikasi langsung antara peneliti dengan informan.Wawancara yang digunakan untuk memperoleh informasi secara langsung, mendalam, tidak berstruktur dan individual.Wawancara tidak

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

berstruktur adalah wawancara dimana pewawancara dapat dengan leluasa memberikan pertanyaan secara lengkap dan mendalam, wawancara tidak berstruktur sangat memadai dalam penelitian kualitatif. Wawancara dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan dan wawancara secara mendalam dengan seluruh informan

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan cara meneliti, mempelajari, serta menelaah dokumen,asip-arsip yang terdapat diinstansi-instansi terkait mengenai penelitian. Peneliti mengumpulkan informasi atau dokumen yang telah tersedia melalui literatur-literatur maupun data-data yang telah tersedia pada instansi terkait dan pustaka yang relevan dengan topic penelitian.Dokumen adalah bahan tertulis ataupun film maupun foto-foto yang dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik sesuai kepentingan.

4. Kuisioner

Kuisioner adalah suatu pengumpulan data yang meliputi dan menyangkut serangkaian yang diajukan kepada responden.

G. Analisis data

Setelah seluruh data diperlukan terkumpul, data tersebut kemudian dikelompokan dan ditabulasikan menurut jenis dan macam data serta ditambahkan dengan keterangan –keterangan secara kualitatif yang sifatnya mendukung dalam menjelaskan hasil penelitian , untuk kemudian dilakukan dianalisis deskriptif. Dimana metode deskriptif untuk menggambarkan secara utuh kenyataan tentang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Kebijakan Dikota Pekanbaru Dalam Menertibkan Parkir Ilegal Di Kota Pekanbaru.

H. Jadwal waktu penelitian

Tabel.lll.II. Jadwal Waktu Penelitian

NO	Jenis Kegiatan	Tahun Bulan/Minggu															
		Oktober-Desember				Januari-Maret				April				Mei			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan UP																
2	Seminar UP																
3	Revisi UP																
4	Revisi Kuesioner																
5	Rekomendasi Survei																
6	Survei Lapangan																

Modifikasi Penulis 2021

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB IV

GAMBARAN UMUM KOTA PEKANBARU

A. SEJARAH SINGKAT KOTA PEKANBARU

Berdasarkan Penetapan Gubernur Sumatera di Medan No 103 tanggal 17 Mei 1956, Kota Pekanbaru dijadikan Daerah Otonomi yang disebut *Harminte* (kota Baru) sekaligus dijadikan Kota Praja Pekanbaru. Dan pada tahun 1958, Pemerintah Pusat yang dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri RI mulai menetapkan ibukota Provinsi Riau secara permanen. Sebelumnya Kota Tanjung Pinang Kepulauan Riau ditunjuk sebagai ibukota propinsi hanya bersifat sementara. Dalam hal ini Menteri Dalam Negeri RI telah mengirim surat kawat kepada Gubernur Riau tanggal 30 Agustus 1958 No. Sekr. 15/15/6.

Untuk menanggapi maksud surat kawat tersebut, dengan penuh pertimbangan yang dapat dipertanggung jawabkan, maka Badan Penasehat meminta kepada Gubernur supaya membentuk suatu Panitia Khusus. Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Swatantra tingkat I Riau tanggal 22 September 1958 No. 21/0/3-D/58 dibentuk panitia Penyelidik Penetapan Ibukota Daerah Swantantra Tingkat I Riau. Panitia ini telah berkeliling ke seluruh daerah di Riau untuk mendengar pendapat pemuka masyarakat, penguasa Perang Riau Daratan dan Penguasa Perang Riau Kepulauan. Dari angket langsung yang diadakan panitia tersebut, maka diambillah ketetapan bahwa kota Pekanbaru terpilih sebagai ibukota Provinsi Riau. Keputusan ini langsung disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri RI. Akhirnya tanggal 20 Januari 1959 dikeluarkan Surat Keputusan dengan No. Des 52/1/44-25 yang menetapkan Pekanbaru sebagai ibukota Provinsi

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Riau sekaligus Pekanbaru memperoleh status Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru.

Untuk lebih terciptanya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas, maka dibentuklah Kecamatan Baru dengan Perda Kota Pekanbaru No. 4 Tahun 2003 menjadi 12 Kecamatan dan Kelurahan/Desa baru dengan Perda tahun 2003 menjadi 58 Kelurahan/Desa.

Tabel IV.I
Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Pekanbaru

No.	Kecamatan	Luas Wilayah	% Luas Wilayah
1.	Tampan	59,81	9,46
2.	Payung Sekaki	43,24	6,84
3.	Bukit Raya	22,05	3,49
4.	Marpoyan Damai	29,74	4,70
5.	Tenayan Raya	171,27	27,09
6.	Lima Puluh	4,04	0,64
7.	S a i l	3,26	0,52
8.	Pekanbaru Kota	2,26	0,36
9.	Sukajadi	3,76	0,59
10.	Senapelan	6,65	1,05
11.	R u m b a i	128,85	20,38
12.	Rumbai Pesisir	157,33	24,88
	Pekanbaru	**632,26**	**100,00**

Sumber : BPS, Pekanbaru Dalam Angka 2020

Pekanbaru termasuk kota perdagangan dan jasa yang memiliki tingkat urbanisasi yang cukup tinggi dari daerah-daerah di Provinsi Riau. Kota ini juga mendapatkan julukan sebagai kota seribu ruko karena di sepanjang kota ditemukan banyak sekali ruko sebagai pusat aktivitas kegiatan berdagang dan bisnis masyarakat. Untuk sarana transportasi, Pekanbaru memiliki beberapa jalur akses diantaranya adalah satu bandar udara internasional yakni Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II untuk jalur udara, Terminal Bus Bandar Raya Payung

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Sekaki untuk jalur darat dan Pelabuhan Pelita Pantai dan Sungai Duku untuk akses jalur perairan.

Pekanbaru memiliki posisi yang sangat strategis, berada pada jalur Lintas Timur Pulau Sumatera serta terhubung dengan beberapa kota penting di Sumatera seperti Kota Medan, Padang dan Jambi. Kota Pekanbaru dialiri oleh Sungai Siak sebagai sungai terdalam di Indonesia. Sungai Siak mengaliri Pekanbaru dari arah barat ke timur dan berada pada posisi 5-50 m di atas permukaan laut. Pekanbaru beriklim tropis dengan suhu udara berkisar antara 34.1 °C sampai 35.6 °C, serta suhu minimum yakni antara 20.2 °C sampai 23.0 °C.

Komposisi etnik terbanyak di Kota Pekanbaru adalah suku Minangkabau, diikuti dengan suku Melayu, Jawa, Batak dan Tionghoa. Dominasi etnik Minangkabau di Kota Pekanbaru telah membuat bahasa utama yang sering digunakan masyarakat Pekanbaru adalah bahasa Minang, diikuti dengan bahasa Melayu, dan bahasa Indonesia. Semenjak tahun 2010, Pekanbaru juga telah dikenal sebagai kota ketiga terpadat penduduknya di Pulau Sumatera setelah Kota Medan dan Palembang. Agama Islam merupakan agama utama yang dianut oleh penduduk Pekanbaru. Agama lain yang juga dianut masyarakat Pekanbaru diantaranya adalah Kristen, Katolik, Budha, Konghucu dan agama Hindu.

B. Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

1. Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru adalah unit organisasi daerah Kota Pekanbaru yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada wali Kota Pekanbaru

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2. Dinas Perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Daerah melalui sekretaris Daerah

Dalam rancangan Peraturan Dinas Perhubungan tentang tugas pokok, Fungsi Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, Dinas Perhubungan mempunyai tugas dan fungsi :

Tugas pokok :

Dinas perhubungan Kota Pekanbaru mempunyai tugas pemerintah dan pembangunan di bidang perhubungan dan yang diperbantukan kepada daerah di Kota Pekanbaru dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi :

a. Pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan rencana dan program dibidang Perhubungan Kota Pekanbaru
b. Penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan dibidang Perhubungan Kota Pekanbaru
c. Koordinasi, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan ugas bidang Perhubungan Darat
d. Koordinasi, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas dibidang Perhubungan laut
e. Koordinasi pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas dibidang Perhubungan Udara

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang retribusi parkir ditepi jalan umum dikota pekanbaru dengan bagan struktur organisasi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru tersaji pada gambar berikut denagn susunan dan perlengkapan organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
    1) Sub bagian Umum dan Kepegawaian
    2) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian
3. Bidang-bidang terdiri dari
    1) Bidang Perhubungan laut
    2) Seksi Sarana dan Prasarana
    3) Seksi Keselamatan dan Pengawasan
    4) Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Darat
4. Bidang Perhubungan Laut
    1) Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Laut dan Sungai
    2) Seksi Keselamatan dan Pengawasan Angkutan Laut dan Sungai
    3) Seksi Kepelabuhan, Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut dan Sungai
5. Bidang Perhubungan Udara
    1) Seksi sarana dan prasarana
    2) Seksi keselamatan dan pengawasan
    3) Seksi pembinaan
6. Bidang Komunikasi dan Informasi
    1) Seksi pos dan telekomunikasi
    2) Seksi pembinaan dan pengawasan
    3) Seksi komunikasi
7. Unit Pelaksanaan Teknisi Dinas

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

8. Kelompok Jabatan Fungsional

Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru mempunyai tugas pokok membantu walikota melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi di bidang Perhubungan kota pekanbaru. Seksi Angkutan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis operasional, pengawasan dan pengendalian manajemen angkutan darat menetapkan jaringan trayek angkutan dalam kabupaten, melakukan pemberian ijin angkutan umum atau ijin trayek, menyiapkan usulan tarif angkutan penumpang dalam kabupaten, melakukan pembinaan pada usaha angkutan umum, analisis kinerja operasional pelayanan angkutan umum, penetapan lokasi terminal c dan pembinaan operasional terminal.

C. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum

Pesatnya kemajuan kota pekanbaru tidak di iringi dengan kesiapan infrastruktur parkir di tempat-tempat keramaian. Bertambahnya jumlah penduduk dan semakin meningkatnya permintaan jalan untuk menampung kegiatan lalu lintas dan tempat berhenti setelah sampai tujuan (parkir). Kurangnya lokasi untuk memarkirkan kendaraan tersebut berdampak pada penggunaan badan jalan sebagai lokasi parkir

Dalam perannya ketersediaan fasilitas serta pelayanan parkir merupakan tugas pemerintah kota pekanbaru sebagai wakil masyarakat kota pekanbaru dalam merespon suatu dampak yang timbul akibat kenaikan jumlah motoritas yang ada

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dikota pekanbaru namun dalam pelaksanaanya pemerintah kota pekanbaru bukan lah satu-satunya lembaga yang diharuskan melakukan pelayanan tersebut, mengingat pada dasarnya fungsi atau tugas pokok pemerintah adalah sebagai lembaga yang menentukan suatu kebijakan sedangkan pelaksanaan atau implementasi dari suatu kebijakan atau di laksanakan pemerintah secara bersama dengan masyarakat. Pergerakan penduduk di kota pekanbaru pada dasarnya dapat di golongkan pada sistem transportasi yang ada sekarang yaitu : pertama sistem pada angkutan umum. Ketergantugan transportasi dapat di lihat dari kepentingan atau kebutuhan dari yang melakukan pergerakan-pergerakan antara lokasi-lokasi kegiatan, yaitu penduduk sebagai subjek dari pergerakan tersebut.

Peranturan daerah nomor 14 tahun 2016 tentang retribusi parkir di tepi jalan umum. Pemerintah kota pekanbaru berusaha untuk meningkatkan pendapatan asli daerah kota pekanbaru dari sektor retribusi parkir dengan menetapkan badan jalan umum sebagai fasilitas parkir. Parkir di atur dalam perda nomor 14 tahun 2016 angka 35 menyebutkan parkir adalah keadaan tidak, bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.

Fasilitas parkir dalam peraturan daerah nomor 2 pasal 1 angka 38 menyebutkan fasilitas parkir pada badan jalan adalah fasilitas parkir untuk kendaraan yang menggunakan sebagian badan jalan. Dengan meningkatnya jumlah kendaraan di kota pekanbaru, maka pemerintah daerah kota pekanbaru menetapkan badan jalan umum sebagai fasilitas parkir yang di punggut retribusinya kepada orang pribadi maupun umum.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Implementor dari perda No 14 tahun 2016 ini adalah perhubungan. Dan ini menyebabkan tidak tertibnya perparkiran dan semakin macet. Untuk meningkalkan pendapatan asli daerah melalui pemungutan retribusi, pemerintah daerah menetapkan target retribusi. (Rahman, 2018) adanya aktifitas pada pusat perdagangan akan mengakibatkan adanya bangkitan perjalanan, dari bangkitan perjalanan akan menimbulkan bangkitan parkir di daerah/kawasan perdagangan. Hal tersebut akan menumbuhkan lokasi-lokasi parkir baru di badan jalan *(on-street parking)* akibat dari parkir di badan jalan menyebabkan hambatan pergerakan arus lalu lintas pada ruas jalan dan besar**.**Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 dalam BAB II pasal 2, pasal 3, pasal 4, dan BAB XIII pasal 18 sebagai berikut :

Bab ll

Nama , jenis , objek dan subjek retribusi

Pasal II

Dengan nama retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir ditepi tepat jalan umum.

Pasal III

1. Objek retribusi sebagai mana di maksud dalam pasal 2 adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pelayanan sebagai mana di maksud ayat 1 meliputi :
    a. Pengaturan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

b. Penataan/ penempatan; dan

c. Penertiban

3. Pelayanan sebagai mana dimaksud pada ayat 2 dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab pemungut retribusi.
4. Pelaksanaan sehari-hari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dilaksanakan oleh juru parkir yang ditunjuk/ dipekerjakan oleh pemungut retribusi

Bab XIII

Pembinaan dan pengawasan

Pasal 18

1. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan parkir dilakukan oleh dinas melalui UPTD parkir.
2. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dalam bentuk :
   a. Penyuluhan hukum kepada masyarakat melalui sosialisasi.
   b. Pendidikan dan pelatihan kepada juru parkir
   c. Peningkatan disiplin kepada juru parkir
3. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dalam bentuk :
   a. Mengawasi petugas parkir dilapangan
   b. Mengawasi ketertiban kendaraan yang parkir
   c. Mengawasi penyetoran retribusi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam pelaksanaan penelitian yang mengangkat judul evaluasi kebijakan dinas perhubungan kota pekanbaru dalam menertibkan parkir ilegal dikota pekanbaru. Penelitian ini mengambil data yang dibutuhkan dalam hal mengambil kesimpulan. Adapun data dan hasil responden yang dilakukan dalam penelitian ini akan di paparkan sebagai berikut :

A. Identitas Responden

Pada bab ini akan disajikan beberapa hal yang berkaitan dengan identitas responden dan hasil jawaban yang diperoleh dari hasil penyerahan kusioner dan wawancara.

Dalam pelaksanaan penyebaran kusioner, wawancara dan kusioner yang sudah disajikan kepada responden, maka langkah awal yang harus dipenuhi adalah berupa identitas responden dan yang dijadikan responden pada penelitian ini memiliki tingkat pendidikan yang berbeda deskriminasi oleh pegawai yang disajikan oleh sampel dalam penelitian ini. Adapun dinilai bahwa tingkat penelitian ini dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini adalah pada tingkat analisis yang akan diberikan dalam pelaksanaan Pertauran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum. Hal ini dapat dilihat dari jumlah reponden yang terdiri dari jenis kelamin, umur dan pendidikan, yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tebel V.1. Klasifikasi Responden Penelitian Di Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Berdasarkan Jenis Kelamin.

No	Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	Laki-laki	32	77.5%
2	Perempuan	9	22.5%
Jumlah		41	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui responden penelitian laki-laki sebanyak 32 orang, dimana jumlah 32 adalah jumlah produktif kerja secara maksimal, dan selanjutnya untuk responden perempuan berjumlah 9 orang dikatakan perempuan memperoleh kinerja yang terbatas sehingga perempuan hanya 9 orang. Kemudian untuk penggolongan responden penelitian selanjutnya berdasarkan umur yang mana dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel V.II. Klasifikasi Responden Penelitian Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Berdasarkan Umur.

No	Umur	Jumlah Responden	Persentase
1	25 tahun	-	-
2	25-39 tahun	13	30%
3	40-49 tahun	20	50%
4	50 tahun	8	20%
Jumlah		41	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2021

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa responden terbesar adalah antara usia 40-49 tahun dengan jumlah 20 orang atau sekitar 50%, hal ini disebabkan karena usia 40-49 tahun merupakan usia yang produktif dan aktif dalam melakukan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

sebuah pekerjaan atau kegiatan. Kemudian usia responden umur 25-39 sebanyak 13 orang atau sekitar 30% dan selebihnya yaitu berusia 50 ke atas berjumlah 8 orang atau sekitar 20% dari keseluruhan responden. Kemudian penggolongan responden penelitian berdasarkan penelitian yang merupakan faktor penilaian pengetahuan responden, yang mana dapat terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel V.III. Klasifikasi Responden Penelitian Di Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Jenis kelamin	Jumlah Responden	Persentase
1	SD	-	-
2	SMP	-	-
3	SMA	10	25%
4	Diploma	16	37.5%
5	Sarjana	14	35%
6	Pasca Sarjana	1	2.5%
Jumlah		41	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2021

Dari data diatas terlihat bahwa tingkat pendidikan responden terbesar adalah diploma sebanyak 16 oang atau sekitar 37.5% hal ini adalah tingkat pendidikan yang sudah baik dalam melaksanakan kinerjanya secara menyeluruh. Selanjutnya dalam tingkat pendidikan sarjana yang mana berjumlah 14 responden atau sekitar 35%, selanjutnya responden SMA sebanyak 10 responden atau sekitar 25%, selanjutnya responden pasca sarjana sebanyak 1 responden atau sekitar 2.5% dari keseluruhan jumlah responden.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

B. Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbru No 14 Tahun 2016 Tentang Evaluasi Kebijakan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dalam Menertibkan Parkir Ilegal Dikota Pekanbaru

Dalam pelaksanaan tugasnya dengan memberikan pelayanan kesamaan hak serta keseimbanagn hak dan kewajiban. Menjelaskan terhadap pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam menetapkan Peraturan Dearah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Evaluasi Kebijakan Dishub Kota Pekanbaru Dalam Menertibkan Parkir Ilegal Di Kota Pekanbaru.

Pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru yang telah terlaksana di kota pekanbaru dalam penertian parkir ilegal telah memberikan kontribusi yang dinilai melaksanakan tugasnya dengan baik. Hal ini dinilai dari tugas dinas perhubungan kota pekanbaru melalui peraturan daerah kota pekanabru nomor 14 tahun 2016 tentang retribusi parkir di tepi jalan umum, tingkat keamanan dan kenyamanan yang ditetapkan dan terlaksanakan

1. Efektivitas

Efektifitas yaitu pencapaian tujuan secara tepat serta tujuan-tujuan yang tepat dan terarahnya kebijakan yang sesuai dengan tujuan dan fungsinya dalam penanganan parkir. Dengan pengertian efektifitas seperti itu makan dalam pelaksanaan perda nomor 14 tahun 2016 tentunya harapan dan aspek ketetapan dan arahan kebijakan ke sasaran yang diinginkan dapat dicapai. Sejalan dengan itu guna mengetahui efektifitas pelaksanaan perda nomor 14 tahun 2016 Tentang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Evaluasi Kebijakan Dishub Kota Pekanbaru Dalam Menertibkan Parkir Ilegal Di Kota Pekanbaru.

1. Penetapan peraturan
2. Pemberian izin parkir
3. Menetapkan besar tarif parkir

Serta lebih jelasnya, hasil tanggapan responden dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Evaluasi Kebijakan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dalam Menertibkan Parkir Ilegal Di Kota Pekanbaru, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel V.IV. Penilaian Jawaban Responden Mengenai Indikator Efektifitas

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Penetapan Peraturan	6 (15%)	29 (71%)	6 (15%)	40
2	Pemberian Izin Parkir	8 (20%)	25 (61%)	8 (20%)	40
3	Menetapkan Besar Tarif Parkir	7 (17%)	20 (49%)	14 (34%)	40
Jumlah		**21**	**74**	**28**	**120**
Rata-rata		**7**	**24**	**10**	**40**
Persentase		**17%**	**59%**	**24%**	**00%**

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2021

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk indikator efektifitas dalam item penilaian penetapan peraturan responden penilaian pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru yang menjawab terlaksana sebanyak 6 responden atau (15%)denag alasan, peratutan daearh kota pekanbaru nomor 14 tahun 2016 tentang Evaluasi Kebijakan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dalam Menertibkan Parkir Ilegal

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Di Kota Pekanbaru terlihat sudah terlaksanakan hal ini diketahui tempat parkir dan anggota parkir sudah terdapat memiliki izin serta pembayaran terhadap pengguna parkir.

Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 29 responden atau 71% dengan alasan penetapan peraturan daerah kota pekanbaru nomor 14 tahun 2016 tentang Evaluasi Kebijakan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dalam Menertibkan Parkir Ilegal Di Kota Pekanbaru sebagai pelaksanaan dilapangan, melalui izin parkir penetapan pembayaran retribusi serta anggota. Akan tetapi hal ini belum terlihat terlaksanakan secara merata dimana diketahui parkir masih ada yang tidak memiliki izin gangguan. Hal ini mengakibatkan kurangnya pendapatan aski daerahdan tidak adanya kenyamanan bagi pengguna parkir. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 6 reponden atau 15% dengan alasan, penetapan peraturan daerah kota pekanbaru nomor 14 tahun 2016 tentang Evaluasi Kebijakan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dalam Menertibkan Parkir Ilegal Di Kota Pekanbaru, melalui dinas perhubungan kota peknabaru sebagai pelaksana dilapangan terlihat belum diterapkan secara merata hai ini masih banyak ditemui masih banyak parkir belum memiliki izin serta belum terkena pajak retribsui oleh dinas perhubungan kota pekanbaru.

Kemudian untuk item penilaian pemberian izin parkir yang mana responden penelitian pada pemberian izin parkir yang mana reesponden penelitian pada pemberian izin parkir yang menyatakan terlaksana berjumlah 8 responden atau 20% dengan alasan, pemberian izin parkir sudah terlaksana melalui perturan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

daerah kota pekanbaru nomor 14 tahun 2016 tentang Evaluasi Kebijakan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dalam Menertibkan Parkir Ilegal Di Kota Pekanbaru. Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa tanggapan atau jawaban responden penelitian mengenai efektifitas melalui penerapan peraturan daerah kota pekanbaru nomor 14 tahun 2016 tentang Evaluasi Kebijakan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dalam Menertibkan Parkir Ilegal Di Kota Pekanbaru dalam pemberian izin parkir maka dalam kategori cukup terlaksana katagori cukup terlaksana dengan nilai responden 24 atau 59% dengan alasan dalam penetapan peraturan terhadap penertiban parkir ilegal sebagaimana dilaksanakan oleh dinas perhubungan kota pekanbaru sudah terlaksana dalam menerapkan peraturan tersebut akan tetapi dalam hal penetapan peraturan yang masih ditemuinya parkir ilegal dikota pekanbaru. Hal ini dapat dari hasil tanggapan responden yang menanyakan efektifitas dalam peraturan daerah kota pekanbaru nomor 14 tahun 2016 tentang Evaluasi Kebijakan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dalam Menertibkan Parkir Ilegal Di Kota Pekanbaru melalui penetapan, peraturan, pemberian izin parkir, penetapan besar parkir yang diberikan terhadap masyarakat pengguna parkir di kota pekanbaru.

2. Efisiensi

Efisiensi adalah usaha pencapaian hasil yang digunakan secara optimal yang dicapai oleh penggunaan sumber daya yang ada yang berdasarkan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan. Dengan pengertian efisiensi seperti itu masa dalam pelaksanaan perda no 14 tahun 2016 tentunya harapan dan aspek ketetapan dan arahan kebijakan ke sasaran yang diinginkan dapat dicapai. Sejalan dengan itu

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

guna mengetahui efisiensi pelaksanaan perda nomor 14 tahun 2016 tentang Evaluasi Kebijakan Dinasperhubungan Kotapekanbaru Dalam Menertibkan Parkir Ilegal Di Kota Pekanbaru menetapkan 3 item penilaian yaitu :

1. Pelaksanaan ketertiban
2. Penetapan kegiatan
3. Sasaran pelaksanaan kegiatan

Untuk lebih jelasnya, hasil tanggapan responden dalam pelaksanaan peraturan daerah kota pekanbaru nomor 14 tahun 2016 tentang Evaluasi Kebijakan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dalam Menertibkan Parkir Ilegal Di Kota Pekanbaru dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel V.V Penilaian Jawaban Responden Mengenai Indikator Efisiensi

No	**Item Penilaian**	**Kategori Penilaian**			**Jumlah**
		Terlaksana	**Cukup Terlaksana**	**Kurang Terlaksana**	
1	Pelaksanaan ketertiban	8 (20%)	26 (66%)	6 (15%)	40
2	Penetapan kegiatan	12 (38%)	25 (49%)	8 (20%)	40
3	Sasaran pelaksanaan kegiatan	7 (17%)	24 (59%)	9 (24%)	40
Jumlah		**27**	**70**	**23**	**123**
Rata-rata		**9**	**24**	**8**	**41**
Persentase		**22%**	**58%**	**20%**	**100%**

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2021

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk indikator efisiensi dalam item penilaian pelaksanaan ketertiban responden penelitian pada dinas perhubungan kota pekanbaru yang menjawab terlaksana 8 responden atau (20%) dengan alasan, sasaran peraturan dalam penertiban parkir melalui perturan daerah kota pekanbaru

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

nomor 14 tahun 2016 tentang Evaluasi Kebijakan Dalam Menertibkan Parkir Ilegal Di Kota Pekanbaru, hal ini telah di ketahui parkir melalui pendataan dikota pekanbaru sudah terdapat memiliki izin serta pembayaran pengunjung pengguna parkir tersebut. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 26 responden atau 60% dengan alasan sasaran peraturan daerah kota pekanbaru nomor 24 ahun 2016 tentang Evaluasi Kebijakan Dalam Menertibkan Parkir Ilegal Di Kota Pekanbaru. Melalui izin sudah tetap sasaran dalam peraturan yang ditetapkan melalui penetapan pembayaran parkir serta tempat dan anggota parkir. Akan tetapi dimana diketahui parkir masih ada yang tidak berdata serta memiliki izin parkir dari dinas perhubungan kota pekanbaru nomor 14 tahun 2016 tentang Evaluasi Kebijakan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dalam Menertibkan Parkir Ilegal Di Kota Pekanbaru.

Kemudian untuk item penilaian penetapan kegiatan yang mana responden penelitian pada dinas perhubungan kota pekanbaru dalam menertibkan parkir ilegal di kota pekanbaru yang menyatakan terlaksana 13 responden atau 38% dengan alasan, pelaksanaan ketertiban parkir melalui pemberian izin parkir berdasarkan peraturan daerah kota pekanbaru nomor 14 tahun 2016 tentang Evaluasi Kebijakan Dalam Menertibkan Parkir Ilegal Di Kota Pekanbaru hal ini dilaksanakan melalui menetapkan kegiatan pendataan terhadap parkir yang ada, menetapkan prosedur pembayaran izin usaha rumah makan serta memberikan himbauan terhadap parkir yang belum memiliki izim serta saksi hukum maupun denda. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 20 atau 49% dengan alasan, pelaksanaan kegiatan penertiban parkir ilegal dikota

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

pekanbaru dengan penetapan peraturan berdasarkan peraturan daerah kota pekanbaru nomor 14 tahun 2016 tentang Evaluasi Kebijakan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dalam Menertibkan Parkir Ilegal Di Kota Pekanbaru dalam pemberian izin parkir sudah terlaksana hal ini dilihat dinas sudah turun langsung kelapangan dalam menata kepemilikan tempat parkir. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 8 responden atau 20% dengan alasan, pelaksanaan kegiatan ketertiban tempat parkir melalui pemberian izin parkir belum terlihat terlaksana dimana diketahui penertiban yang dilakukan dinas perhubungan kota pekanbaru hanya melakukan surve tanpa adana saksi hokum maupun denda terhadap pelaksanaan parkir ilegal.

Kemudian untuk item penilaian sasaran pelaksanaan kegiatan yang mana responden penelitian pada berdasarkan evaluasi peraturan daerah kota pekanbaru nomor 14 tahun 2016 tentang evaluasi kebijakan dinas perhubungan kota pekanbaru dalam menertibkan parkir ilegal dikota pekanbaru yang menyatakan terlaksana berjumlah 7 responden atau 17% dengan alasan, sasaran pelaksanaan kegiatan dalam penetapan perparkiran melalui peraturan izin usaha rumah makan berdasarkan evaluasi peraturan daerah kota pekanbaru nomor 14 tahun 2016 tentang evaluasi kebijakan dinas perhubungan kota pekanbaru dalam menertibkan parkir ilegal dikota pekanbaru dan pengelolaan perparkiran terlihat sudah memiliki izin serta pembayaran parkir melalui tarif prosedur yang ditetapkan.

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa tanggapan atau jawaban responden penelitian mengenai efisiensi melalui pelaksanaan peraturan daerah kota pekanbaru nomor 14 tahun 2016 tentang evaluasi kebijakan dinas

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

perhubungan kota pekanbaru dalam menertibkan parkir ilegal dikota pekanbaru, cukup terlaksana kategori cukup terlaksana dengan nilai responden 24 atau 58% dengan alasan dalam penetapan peraturan terhadap perparkiran sebagaimana dilaksanakan oleh dinas perhubungan kota pekanbaru sudah terlaksanakan dalam menerapkan peraturan daerah tersebut.

3. Kecukupan

Kecukupan ialah kebijakan dalam pelaksanaan dan program peraturan yang ditetapkan antara kerjasama kinerja organisasi dalam pencapaian tujuan dengan pengertian kecukupan seperti itu maka dalam pelaksanaan perda nomor 14 tahun 2016 tentunya harapan dan aspek ketepatan dan arahan kebijakan ke sasaran yang diinginkan dapat dicapai. Sejalan dengan itu guna mengetahui kecukupan pelaksanaan perda no 14 tahun 2016 tentang evaluasi kebijakan dalam menertibkan parkir ilegal dikota pekanbaru menetapkan tiga item penilaian yaitu :

1. Kerjasama antara atasan dan bawahan
2. Pendataan terhadap lokasi parkir
3. Pendataan terhadap juru parkir

Untuk lebih jelasnya, hasil tanggapan responden dalam pelaksanaan peraturan daerah nomor 14 tahun 2016 tentang evaluasi kebijakan dinas perhubungan kota pekanbaru dalam menertibkan parkir ilegal dikota pekanbaru dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tabel V.VII Penilaian Jawaban Responden Mengenai Indikator Kecukupan

No	Item penilaian	Kategori penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Kerjasama antara atasan dan bawahan	10 (24%)	25 (63%)	5 (12%)	40
2	Pendataan terhadap lokasi parkir	12 (41%)	23 (59%)	5 (12%)	40
3	Pendataan terhadap juru parkir	10 (24%)	20 (49%)	9 (24%)	40
Jumlah		**32**	**68**	**19**	**120**
Rata-rata		**11**	**23**	**6**	**40**
Persentase		**27%**	**56%**	**17%**	**100%**

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2021

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk indikator kecukupan dalam item penilaian kerjasama antara atasa dan bawahan responden penelitian pada dinas perhubungan kota pekanbaru yang menjawab terlaksana 10 responden atau 24% dengan alasan, kerjasama dengan atasan dalam penertiban parkir ilegal melalui turun langsung kelapangan terhadap parkir yang ada dikota pekanbaru, dan melalui mendata parkir, anggota parkir serta besar tarif parkir yang ditetapkan yang berdasarkan penetapan peraturan daeah kota pekanbaru nomor 14 tahun 2016 tentang evaluasi kebijakan dinas perhubungan kota pekanbaru dalam menertibkan parkir ilegal dikota pekanbaru. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 26 responden 63% dengan alasan kegiatan atasan dan bawahan dalam penertiban perparkiran di kota pekanbaru sejauh ini sudah terlaksana akan tetapi himbaun atasan terhadap bawahan dalam penertiban parkir yang sekedarnya saja melalui anjuran mendata parkir, anggota parkir serta

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

besar tarif parkiryang ditetapkan, akan tetapi dalam kerjasama yang diberikan atasan bawahan hanya sekedar saja melainkan tidak adanya penetapan pertaruhan sanksi yang ketat. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 5 responden atau 21% dengan alasan, kerjasama atasan terhadap bawahan belum terlihat terlaksana dimana dalam penetapan penertiban parkir masih ditemui parkir ilegal yang belum mengikuti ketetapan prosedur yang ditetapkan dalam perparkiran.

Kemudian untuk item penilaian pendataan terhadap lokasi parkir yang mana responden penelitian pada berdasarkan evaluasi peraturan daerah nomor 14 tahun 2016 tentang evaluasi kebijakan dinas perhubungan kota pekanbaru dalam menertibkan parkir ilegal dikota pekanbaru yang menyatakan terlaksana berjumlah 13 responden atau 41% dengan alasan, pendataan lokasi parkir yang didasarkan ketentuan penetapan peraturan daerah kota pekanbaru nomor 14 tahun 2016 tentang evaluasi kebijakan dinas perhubungan kota pekanbaru dalam menertibkan parkir ilegal dikota pekanbaru. Melalui parkir yang terdata oleh dinas perhubungan serta ketetapan anggota parkir serta tarif parkir, selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 23 responden atau 59% dengan alasan, pendataan pengelolan parkir yang ditetapkan dinas perhubungan melalui perturan daerah kota pekanbaru nomor 14 tahun 2016 tentang evaluasi kebijakan dinas perhubungan kota pekanbaru dalam menertibkan parkir ilegal dikota pekanbaru dan pengelolan perparkiran sudah terlaksana dimana lokasi parkir yang ada. Akan tetapi pendataan lokasi parkir yang ada belum terdata secara meneyluruh. Selanjutnya responden yang menjawab kurang terlaksana

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

sebanyak 5 responden atau 12% denag alasan dalam penataan lokasi parkir yang dilaksanakan dinas perhubungan melaluin penetapan perda no 14 tahun 2016 belum terlaksana dengan baik hal ini dpaat diketahui lokasi parkir yang ada masih belum terdata serta belum adanyabizin dari dinas perhubungan kota pekanbaru.

Dari observasi yang penulis lalukan dapat diketahui bawha pelaksanan peraturan daerah kota pekanbaru nomor 14 tahun 2016 tentang evaluasi kebijakan dinas perhubungan kota pekanbaru dalam menertibkan parkir ilegal dikota pekanbaru yang dilaksanakan dalam penertiban parkir ilegal dikota pekanbaru dan pengembangan perparkiran denagn turun langsung kelapangan melalui kerjasama atasan dengan bawahan dalam arah ketertiban parkir, mendata lokasi parkir yang ada dikota pekanbaru, serta penataan terhadap juru parkir yang melaksanakan kegiatan parkir. Hal ini dilakukan seriap bulannya meskipun terkadang dalam setiap bulannya belum telaksana tetapi dians perhubungan melakukan surve dibulan berikutnya. Hai ini kami lakukan diseluruh kecamatan yang ada dipekanbaru sehingga dalam kecukupan penetapan peraturan perparkiran dalam kategori cukup terlaksana.

4. Perataan

Perataan yaitu suatu pemberian pencapaian hasil kebijakan terhadap organisasi maupun lingkungan secara menyeluruh berdasarkan tugas dan fungsinya. Dengan penegrtian perataan seperti itu maka dalam pelaksanaan perda no 14 tahun 2016 tentunya harapan dan aspek ketepatan dan arahan kebijakan ke sasaran yang diinginkan dapat dicapai. Sejalan dengan itu guna mengetahui perataan pelaksanaan perda no 14 tahun 2016 tentang evaluasi kebijakan dalam

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

menertibkan parkir ilegal dikota pekanbaru penulis menetapkan 3 item penilaian yaitu :

1. Pelayanan terhadap kepemilikan kendaraan parkir
2. Penetapan biaya parkir
3. Pemberian sanksi

Untuk lebih jelasnya, hasil tanggapan responden dalam pelaksanaan peraturan daerah kota pekanbaru nomor 14 tahun 2016 tentang evaluasi kebijakan dinas perhubungan kota pekanbaru dalam menertibkan parkir ilegal dikota pekanbaru dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel V.VIII Penilaian Jawaban Responden Mengenai Indikator Perataan

No	Item Penelitian	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Pelayanan terhadap kepemilikan	7 (17%)	23 (59%)	10 (24%)	40
2	Penetapan biaya parkir	8 (20%)	27 (66%)	5 (15%)	40
3	Pemberian sanksi	10 (27%)	20 (49%)	9 (24%)	40
Jumlah		**25**	**70**	**24**	**120**
Rata-rata		**9**	**23**	**8**	**40**
Persentase		**22%**	**58%**	**20%**	**100%**

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2021

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa indikator perataan dalam item penelitian pelayanan terhadap kepemilikan kendaraan parkir responden penelitian pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru (17%) dengan alasan, pelayanan terhadap pengguna parkir melalui peraturan Daerah Kota Pekanbaru nomor 14 tahun 2016 tentang evaluasi kebijakan dinas perhubungan kota pekanbaru dalam

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

menertibkan parkir ilegal dikota pekanbaru, hal ini diketahui pelayanan yang diberikan terhadap pengguna parkir dengan datang langsung ke lokasi parkir dengan memberi karcis bukti kepemilikan kendaraan yang sedang parkir. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 24 responden atau 59% dengan alasan pelayanan terhadap masyarakat pengguna parkir dengan menetapkan peraturan daerah kota pekanbaru nomor 14 tahun 2016 tentang evaluasi kebijakan dinas perhubungan kota pekanbaru dalam menertibkan parkir ilegal dikota pekanbaru sudah terlaksana melalui lokasi parkir hingga pemberian karcis kendaraan akan tetapi dinas perhubungan belum menerapkan secara maksimal dimana dalam pelayanan yang diberikan cenderung tidak diberikan karcis. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 10 responden atau 24% dengan alasan, pelayanan yang diberikan terhadap pengguna parkir belum tertata dengan baik begitu juga cenderung tidak adanya karcis kendaraan agar mengetahui bukti karcis parkir.

Dari observasi yang penulis lakukandapat diketahui bahwa pelaksanaan peraturan daerah kota pekanbaru nomor 14 tahun 2016 tentang evaluasi kebijakan dinas perhubungan kota pekanbaru dalam menertibkan parkir ilegal dikota pekanbaru dalam penertiban perparkiran dengan memberikan pelayanan seluasnya terhadap masyarakat dalam pengguna parkir yang ada dimana dinas perhubungan juga turun langsung kelapangan untuk mengecek tempat parkir tersebut, dan memberikan sanksi dalam bentuk denda dan penutupan parkir belum izin meskipun terkadang personil dinas perhubungan masih kurang dalam penertiban

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dari atasan dalam pelaksanaan pemantauan dan pengawasan di lapangan sehingga dalam perataan peraturan perparkiran dalam kategori cukup terlaksana.

5. Responsivitas

Responsivitas yaitu kemampuan birokrasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, serta melaksanakan dan mengembangkan program-program sesuai dengan kebutuan dan aspirasi masyarakat. Dengan pengertian responsivitas seperti itu maka dalam pelaksanaan perda nomor 14 tahun 2016 tentunya harapan dan aspek ketetapan dan arahan kebijakan ke sasaran yang diinginkan dapat dicaapi. Sejalan dengan itu guna mengetahui responsivitas pelaksanaan perda no 14 tahun 2016 tentang evaluasi kebijakan dalam menertibkan parkir ilegal dikota pekanbaru penulis menerapkan 3 item penilaian yaitu :

1. Penetapan ketertiban parkir.
2. Melaksanakan kenyamanan.
3. Menyediakan sarana parkir.

Untuk lebih jelasnya, hasil tanggapan responden dalam pelaksanaan peraturan daerah kota pekanabru nomor 14 tahun 2016 tentang evaluasi kebijakan dalam menertibkan parkir ilegal dikota pekanbaru dapat dilihat pada atbel dibawah ini :

Tabel V.IX Penilaian jawaban Responden Mengenai Indikator Responsibilitas

No	Item penilaian	Kategori penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Penetapan Ketertiban Parkir	9 (24%)	23 (56%)	8 (20%)	40

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2	Melaksanakan Kenyamanan	10 (20%)	24 (66%)	6 (15%)	40
3	Menyediakan Sarana Parkir	13 (24%)	18 (51%)	8 (22%)	40
Jumlah		**32**	**65**	**22**	**120**
Rata-rata		**11**	**21**	**8**	**40**
Persentase		**26%**	**54%**	**20%**	**100%**

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2021

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk indikator efektifitas dalam item penilaian penetapan peraturan responden penelitian pada dinas parkir melalui peraturan daerah kota pekanbaru nomor 14 tahun 2016 tentang evaluasi kebijakan dinas perhubungan kota pekanbaru dalam menertibkan parkir ilegal dikota pekanbarut terlihat sudah terlaksana hal ini diketahui tempat parkir dan anggota parkir sudah terdapat memiliki izin serta pembayaran terhadap retribusi usaha parkir tersebut. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 23 responden atau 56% dengan alasan penetapan ketertiban parkir penetapan peraturan daerah nomor 16 tahun 2016 tentang evaluasi kebijakan dinas perhubungan kota pekanbaru dalam menertibkan parkir ilegal dikota pekanbaru sebagai pelaksanaan dilapanagn melalui izin parkir penetapan pembayaran retribusi serta pendataan parkir yang ada serta anggota. Akan tetapi hal ini belum terlihat terlaksana secara merata dimana diketahui masih ditemui parkir yang ada yang tidak memiliki izin gangguan. Hal ini mengakibatkan kurangnya pendapatan asli daerah dan tidak adanya kenyamanan bagi pengguna parkir. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 8 responden atau 20% dengan alasan, penetapan peraturan daerah kota pekanbaru nomor 14 tahun 2016 tentang evaluasi kebijakan dinas perhubungan kota pekanbaru dalam menertibkan parkir ilegal dikota pekanbaru sebagai pelaksana dilapangan terlihat

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

belum diterapkan secara merata hal ini ditemui masih banyak parkir belum memliki izin serta penempatan parkir yang tidka dapat tempatnya retribusi oleh dinas perhubungan kota pekanbaru.

Kemudian untuk item penilaian melaksanakan kenyamanan yang mana responden penelitian pada pemberian izin parkir yang menyatakan terlaksana berjumlah 10 responden atau 20% dengan alasan, pemberian izin parkir adalah terlaksana melalui peraturan daerah kota pekanbaru nomor 14 tahun 2016 tentang evaluasi kebijakan dinas perhubungan kota pekanbaru dalam menertibkan parkir ilegal dikota pekanbaru hal ini dalam melaksanakan kenyamanan dilaksanakan melalui pendataan terhadap tempat parkir dengan menetapkan prosedur pembayaran izin pengguna parkir.dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa tanggapan atau jawaban responden penelitian mengenai responsivitas melalui penerapan peraturan daerah kota pekanbaru nomor 14 tahun 2016 tentang evaluasi kebijakan dinas perhubungan kota pekanbaru dalam menertibkan parkir ilegal dikota pekanbaru.

Dari observasi yang penulis lakukan dapat diketahui bahwa pelaksanaan peraturan daerah kota pekanbaru nomor 14 tahun 2016 tentang evaluasi kebijakan dinas perhubungan kota pekanbaru dalam menertibkan parkir ilegal dikota pekanbaru hal ini dapat diketahui melalui penetapan ketertiban parkir serta merata dengan menempatkan lokasi parkir pada tempatnya dengan adanya anggota parkir agar penertiban parkir dalam kategori cukup terlaksana.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

6. Ketepatan

Ketepatan adalah penerapan yang dilaksanakan dengan kegiatan yang terarah agar tujuan tercapainya tugas pelaksanaan yang ditetapkan. Dengan pengertian ketepatan seperti itu maka dalam pelaksanaan perda no 14 tahun 2016 tentunya harapan dan aspek ketetapan dan arahan kebijakan ke sasaran yang diinginkan dapat dicapai. Sejalan denagn guna mengetahui ketepatan pelaksanaan perda nomor 14 tahun 2016 tentang evaluasi kebijakan dinas perhubungan kota pekanbaru dalam menertibkan parkir ilegal dikota pekanbaru penulis menetapkan 3 item penilaian yaitu :

1. Terciptanya arahan kinerja
2. Penetapan peraturan
3. Melakukan pengawasan

Untuk lebih jelasnya hasil tanggapan responden dalam pelaksanaan peraturan daerah kota pekanbaru nomor 14 tahun 2016 tentang evaluasi kebijakan dalam menertibkan parkir ilegal dikota pekanbaru dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel V.X Penilaian jawaban Responden Mengenai Indikator Ketepatan

No	Item penelitian	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	Terciptanya arah kinerja	9 (20%)	25 (66%)	6 (15%)	40
2	Penetapan peraturan	10 (38%)	24 (49%)	5 (20%)	40
3	Melakukan pengawasan	8 (17%)	24 (59%)	8 (24%)	40
Jumlah		**27**	**73**	**19**	**120**
Rata-rata		**9**	**24**	**7**	**40**
Persentase		**22%**	**60%**	**20%**	**100%**

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2021

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa indikator perataan dalam item penilaian penetapan peraturan responden dinas perhubungan kota pekanbaru menjawab terlaksana sebanyak 9 responden atau 20% dengan alasan, penetapan penertiban parkir melalui peraturan daerah kota pekanbaru nomor 14 tahun 2016 tentang evaluasi kebijakan dinas perhubungan kota pekanbaru dalam menertibkan parkir ilegal dikota pekanbaru diketahui tempat parkir dan anggota parkir sudah terdapat memiliki izin serta pembayaran terhadap retribusi usaha parkir. Selanjutnya menjawab cukup terlaksana sebanyak 26 responden atau 66% dengan alasan terciptanya arah kinerja perparkiran melalui penetapan peraturan daerah kota pekanbaru nomor 14 tahun 2016 tentang evaluasi kebijakan dalam menertibkan parkir ielgal dikota pekanbaru dengan penetapan dinas perhubungan kota pekanbaru.

Kemudian utuk item penilaian penetapan peraturan yang mana responden penelitian pada berdasarkan perda nomor 14 tahun 2016 tentang evalausi pelaksanaan dinas perhubungan kota pekanbaru dalam menertibkan parkir ilegal dikota pekanbaru yang menyatakan terlaksana sebanyak 10 responden atau 38% dengan alasan penetapan pelaksanaan perparkiran melalui peraturan daerah kota pekanbaru tentang penertiban parkir ilegal dikota pekanbaru terlihat sudah terlaksana hal ini diketahui tempat parkir dan anggota parkir sudah terdapat retribusi usaha parkir tersebut.

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa tanggapan atau jawaban responden penelitian mengenai ketetapan melalui pelaksanaan peraturan daerah kota pekanbaru nomor 14 tahun 2016 tentang evaluasi kebijakan dinas

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

perhubungan kota pekanbaru dalam menertibkan parkir ilegal dikota pekanbaru, ”dimana dinas perhubungan agar terciptanya parkir yang tepat lokasi dan kenyamanan bagi pengguna parkir, serta melakukan pengawasan parkir yang ada dan mendata parkir serta memberikan bentuk pengembangan parkir terhadap parkir yang memiliki izin serta memberikan sanksi terhadap parkir ilegal yang ada. Hal ini dinas perhubungan melalui pendataan pengawasan agar tidak terjadinya parkir ilegal yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan yang ada.”

Dari observasi yang penulis lakukan dapat diketahui bahwa pelaksanaan peraturan daerah kota pekanbaru nomor 14 tahun 2016 tentang evaluasi kebijakan dinas perhubungan kota pekanbaru dalam menertibkan parkir ilegal dikota pekanbaru. Pengelolaan parkir dalam bentuk kerjasama dengan bawahan yang bertujuan arah kinerja yang terarah dalam penanganan parkir, melalui penetapan peraturan yang ditetapkan dimana dinas perhubungan agar terciptanya parkir yang tepat lokasi dan kenyamanan bagi pengguna parkir, serta melakukan pengawasan parkir yang ada dan mendata parkir serta memberi bentuk pengembangan parkir terhadap parkir yang memiliki izin serta memberikan bentuk pengembangan terhadap parkir yang memiliki izin serta memberikan sanksi terhadap parkir ilegal yang ada. Hal ini Dinas Perhubungan melalui pendataan, pengawasan agar tidak terjadinya parkir ilegal yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan yang ada, sehingga dapat dikatakan pelaksanakan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2016 tentang evaluasi kebijakan dinas perhubungan kota pekanbaru dalam menertibkan parkir ilegal dikota pekanbaru

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

melalui Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam penertiban parkir ilegal dalam kategori cukup terlaksanakan.

C. Jawaban Responden

Untuk mengetahui semua jawaban dari responden penelitian yang mana bertujuan untuk mengetahui jawaban dan tanggapan dari responden penelitian yang mana bertujuan untuk mengetahui jawaban dan tanggapan dari responden penelitian yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel V.XIJawaban Responden

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1	**Efektivitas**	7 (22%)	24 (59%)	10 (24%)	40
2	**Efisiensi**	9 (22%)	24 (58%)	8 (24%)	40
3	**Kecukupan**	11 (27%)	23 (56%)	6 (17%)	40
4	**Perataan**	9 (22%)	23 (58%)	8 (20%)	40
5	**Responsivitas**	9 (26%)	21 (54%)	7 (18%)	40
6	**Ketepatan**	9 (22%)	24 (59%)	7 (18%)	40
Jumlah		**54**	**139**	**40**	**200**
Rata-rata		**9**	**23**	**8**	**40**
Persentase		**23%**	**57%**	**20%**	**100%**

sumber : Olahan Data Penelitian, 2021

Dari tabel di atas terlihat bahwa responden pelaksanaan peraturan daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2016 TentangEvaluasi Kebijakan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dalam Menertibkan Parkir Ilegal Di Kota Pekanbaru.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

1. Untuk etfekifitas yang menjawab terlaksana 7 atau 17%, selanjutnya untuk jawaban cukup terlaksana 24 atau 59%, dan responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 10 atau 24%.
2. Untuk indikator kedua yaitu Efisiensi dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru nomor 14 tahun 2016 Tentang Evaluasi Kebijakan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dalam Menertibkan Parkir Ilegal Di Kota Pekanbaruterlaksana 9 responden atau 22%, selanjutnya untuk jawaban cukup terlaksana sebanyak 24 responden atau 58%, dan responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 8 responden atau 20%.
3. Untuk indikator ketiga kecukupan dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru nomor 16 tahun 2016 Tentang Evaluasi Kebijakan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dalam Menertibkan Parkir Ilegal Di Kota Pekanbaru yang menjawab terlaksana 11 responden atau 27%, selanjutnya untuk menjawab cukup terlaksana sebanyak 23 responden atau 56%, dan responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 6 responden atau 17%.
4. Untuk indikator keempat perataan dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Evaluasi Kebijakan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dalam Menertibkan Parkir Ilegal Di Kota Pekanbaru yang menjawab terlaksana 9 responden atau 22%, selanjutnya untuk menjawab cukup terlaksana sebanyak 23 responden atau 58%, dan responden yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 8 atau 22%.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

5. Untuk indikator kelima Responsivitas dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Evaluasi Kebijakan Dinas Perhubungan Dalam Menertibkan Parkir Ilegal Di Kota Pekanbaru yang menjawab 9 responden atau 26%, selanjutnya untuk menjawab cukup terlaksana sebanyak 21 responden atau 54%, dan yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 8 responden atau 20%.
6. Untuk indikator keenam ketepatan dalam Pelaksanaan Peraturan daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Evaluasi Kebijakan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dalam Menertibkan Parkir Ilegal Di Kota Pekanbaru yang menjawab terlaksana 9 responden atau 26%, selanjutnya untuk jawaban cukup terlaksana sebanyak 21 responden atau 54%, dan yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 8 responden atau 20%.

Secara keseluruhan dari tabel diatas terlihat bahwa untuk responden yang menjawab terlaksana dengan rata-rata 9 orang atau persentase 23%, selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup terlaksana dengan rata-rata 23 orang atau persentase 57%, selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang terlaksana 8 orang atau 20%, sehingga dari tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Evaluasi Kebijakan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dalam Menertibkan Parkir Ilegal Di Kota Pekanbaruoleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam melaksanakan tugasnya dalam kemajuan wajib dalam penertiban parkir ilegal di Kota Pekanbaru sudah terlaksana dengan melakukan penerapan peraturan, himbauan, pemberian sanksi terhadap parkir ilegal, dan sampai sanksi denda, dengan adanya kerjasama

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

pegawai antara atasan dan bawahan sampai dengan anggota parkir melalui penerapan peraturan perparkiran dapat dikatakan cukup terlaksana, yang didapatkan dari keseluruhan jawaban responden yang menjawab dengan rata-rata 23 atau persentase 57%, dengan melihat pengukuran yang telah penulis tentukan sebelumnya yaitu dalam rentang antara 34%-65% maka Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Evaluasi Kebijakan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dalam Menertibkan Parkir Ilegal Di Kota Pekanbaru dalam kategori cukup terlaksana.

D. Hambatan Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Evaluasi Kebijakan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dalam Menertibkan Parkir Ilegal Di Kota Pekanbaru

Adapun hambatan yang dapat penulis ketahui mengenai Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Evaluasi Kebijakan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dalam Menertibkan Parkir Ilegal Di Kota Pekanbaru**,** meliputi :

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Evaluasi Kebijakan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dalam Menertibkan Parkir Ilegal Di Kota Pekanbaru dimana Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam melaksanakan tugasnya dalam kemajuan parkir agar parkir yang ada terdata serta memiliki kemajuan dalam pendataan Asli Kota Pekanbaru dengan melakukan penerapan peraturan, himbauan, pemberian sanksi terhadap parkir ilegal yang tidak memiliki izin sampai sanksi denda terhadap parkir yang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

tidak memiliki izin parkir dari Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, dengan adanya kerjasama pegawai antara atasan dengan bawahan melalui penerapan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Evaluasi Kebijakan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dalam Menertibkan Parkir Ilegal Di Kota Pekanbaru.

Pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru adalah jumlah pegawai dalam penertiban, pengawasan, pemantauan parkir di tepi jalan kota pekanbaru. Hal ini di akibatkan kurangnya jumlah petugas dalam menertibkan sampai kelokasi parkir yang ada makan yang seharusnya petugas Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dapat ditemui dalam melaksanakan tugasnya serta parkir yang ada berdasarkan ketetapan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan parkir.

Kemampuan teknis Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru yang dinilai masih lambat dalam menagani hambatan-hambatan dalam perparkiran yang ada di kota pekanbaru dan penetapan sanksi yang kuat serta pemberian denda terhadap parkir ilegal yang ada di kota pekanbaru. Kompetensi petugas belum bekerjasama baik dengan masyarakat wilayah parkir yang mana Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru yang hanya melaksanakan tugasnya tanpa menetapkan kemajuan parkir melalui keamanan dan kenyamanan pengguna parkir sedangkan para parkir ilegal hanya berlangsung begitu saja tanpa adanya izin parkir yang diberikan Dians Perhubungan Kota Pekanbaru dari hal tersebut dapat diketahui masih banyak parkir yang ada di kota pekanbaru belum memiliki izin parkir yang ditetapkan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan dalam penelitian mengenai evaluasi pelaksanaan Perda Kota Pekanbaru Nomor 14 tahun 2016 Tentang Evaluasi Kebijakan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dalam Menertibkan Parkir Ilegal Dikota Pekanbaru ini, dapat diperoleh simpulan, sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Evaluasi Dinas perhubungan Kota Pekanbaru Dalam Menertibkan Parkir Ilegal Dikota Pekanbaru belumlah berjalan efekttif. Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru hanya melakukan tindakan preventif yang sifatnya hanya sementara karena tidak menanggulangi parkir ilegal secara tuntas. Rekomendasi yang digunakan dalam menanggulangi parkir ilegal adalah meresmikan petugas parkir ilegal dengan memberikan lokasi parkir baru yang letaknya tidak mengganggu ketertiban umum.
2. Dari hasil penelitian, penulis menemukan beberapa faktor-faktor yang menghambat Dinas perhubungan Kota Pekanbaru Dalam Menertibkan Parkir Ilegal di Kota Pekanbaru antara lain; masih adanya juru parkir nakal yang tetap melakukan pungutan ilegal, masih adanya juru parkir ilegal yang mendiami kawasan parkir, sarana dana prasarana yang kurang mendukung dalam hal penyediaan lahan parkir dan titik-titik lokasi parkir.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

B. Saran

Dari kesimpulan di atas maka penulis mencoba untuk memberikan saran yang di anggap relevan dan dapat membantu Dishub Kota Pekanbaru Dalam Menertibkan Parkir Ilegal di Kota Pekanbaru antara lain;

1. UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru selain menyediakan lahan parkir Juga seharusnya dan hendaknya lebih tegas lagi menindak juru parkir ilegal yang seenaknya yang tidak sesuai dengan peraturan daerah dengan memberikan pemahaman tentang undang-undang peraturan parkir. Masalah juru parkir ilegal yang belum terdaftar di Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru hendaknya segera didaftarkan dan ditempatkan pada parkir on street yang tidak menimbulkan kemecetan.
2. Membentuk tim pengawas khusus perparkiran. Tim pengawasan dapat dibentuk menjadi beberapa bagian dan mengawasi disetiap titik yang berpotensi menjadi parkir ilegal.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Amir,M Taufiq. 2012. Manajemen Strategik Konsep dan Aplikasi, Jakarta: PT Raja Grafindo persada .

Arikunto, S. 2002. Prosedur Suatu Penelitian: Pendekatan Praktek Jakarta : Rineka Cipta.

Dunn, William N. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta

Duun, william N. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta

Gaffar, Afan. 2009. Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi. Yogyakarta:Pustaka Pelajar.

Gulo W. 2005. Metodelogi Penelitian. Jakarta: Gramedia.

Ishak, Relasi Kuasa dalam Kehidupan Politik Masyarakat Melayu Riau : Menemukan Penopang Demokrasi di Aras Lokal, Jurnal, FISIP Universitas Riau, Pekanbaru.

Islamy, M. Irfan. 2000. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Jakarta Sinar Grafika.

Kuncoro, Mudrajad.2005. Strategi bagaimana Meraih Keunggula. Kompetitif Jakarta: Erlangga.

Moleong, Lexy. 2005. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Rosdakarya.

Munaf, Yusri 2016. Hukum Administrasi Negara. Pekanbaru

Ndraha. 2011. Kybernologi Ilmu Pemerintahan Baru. Jakarta: Rineka Cipta

Nugroho .2004. Kebijakan Publik Di Negara-Negara Berkembang. Yogyakarta: Pustaka Belajar

Nugroho D, Riant. 2009. Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi dan Evaluasi, Jakarta : Elex Media Komputindo.

Nugroho. 2009. Kebijakan publik di negara-negara berkembang. Yogyakarta: pustaka belajar

Syafiie, i. Ilmu Pemerintahan. Bandung: Mandar Maju

Syafiie, i. Ilmu Pemerintahan. Bandung: Mandar Maju.

Syafiie,i 2008. Manajemen pemerintahan.Jakarta : PT. Perca

Syafiie,i. 2011. Pengantar Ilmu Pemerintah . Bandung: Refika Aditama

Syafiie.i.2011. Sistem Pemerintahan Indonesia : Rineka Cipta

Tripono, Tedjo dan Udan.2005. manajemen Strategi, Bandung: Cv. Yrama Widya.

Tunggal.Amin Widjaja. 2008. Strategi Kooporat dan Strategi Bisnis Perusahaan, Jakarta: Harvarindo

Winarno, Budi. 2012. Kebijakan Publik. Yogyakarta

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

B. Peraturan perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2016 tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pelayanan Di Bidang Perhubungan Darat

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :